Turnitin Ebook Ancaman Non Militer

by CEK TURNITIN

Submission date: 08-Jun-2024 02:56AM (UTC+0400)
Submission ID: 2397898336
File name: Ebook_Ancaman_Non_Militer.pdf (1.48M)
Word count: 28998
Character count: 190136

ANTISIPASI ANCAMAN NON MILITER DALAM PEMBANGUNAN

Pembangunan suatu negara tidak hanya harus memperhatikan ancaman militer, tetapi juga harus mengantisipasi ancaman non-militer yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Ancaman non-militer dapat berasal dari berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi. Antisipasi ancaman non-militer sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Ancaman non-militer dapat memiliki dampak yang serius terhadap stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.

Buku ini hadir untuk memperkaya khasanah referensi tentang kajian politik pembangunan, keamanan nasional, dan geopolitik. Karena itu, melalui buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh kalangan. Melalui buku ini dapat memotivasi dan memacu dosen, peneliti, mahasiswa, dan pemerhati pertahanan negara untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan agar terus menuangkan ide dan pemikirannya.

CV. Literasi Indonesia
Jl. Wanggu, Kendari 93231
editor@literacyinstitute.org
www.literacyinstitute.org
0852-9979-3323

ISBN 978-623-8303-01-4

ANTISIPASI ANCAMAN NON MILITER DALAM PEMBANGUNAN

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si.

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si.

ANTISIPASI ANCAMAN NON MILITER DALAM PEMBANGUNAN



KATA SAMBUTAN
Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.
Rektor Universitas Sawerigading Makassar

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si.

ANTISIPASI ANCAMAN NON MILITER DALAM PEMBANGUNAN

CV. Literasi Indonesia, 2023

ANTISIPASI ANCAMAN NON MILITER DALAM PEMBANGUNAN

Penulis

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos, M.Si.

ISBN: 978-623-8303-01-4

v + 133 hlm.; 14,8 x 21 cm

Editor

Dr. Ir. Baso Jaya, S.Si., M.Si.

Desain Sampul
wbookdesign

Penerbit
CV. Literasi Indonesia

Bumi Wanggu Permai II Blok D/12
Kota Kendari, 93231, Telp. 085299793323
Email: editor@literacyinstitute.org
Website: www.literacyinstitute.org

Cetakan Pertama: Juni, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.
(Rektor Universitas Sawerigading Makassar)

Alhamdulillahirobbilamin..., Puji Syukur atas hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, kepada kita semua, semoga dalam lindungan-Nya, sehingga karya buku ini dapat dipublikasikan. Sebagai insan akademis yang memiliki tugas utama adalah menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan salah satunya melakukan publikasi buku. Sebagai Rektor Universitas Sawerigading Makassar, saya memberikan apresiasi dan menyampaikan penghargaan atas karya Dekan Fisipol Universitas Sawerigading Makassar Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si., yang berjudul Antisipasi Ancaman Non Militer dalam Pembangunan.

Pembangunan suatu negara tidak hanya harus memperhatikan ancaman militer, tetapi juga harus mengantisipasi ancaman non-militer yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Ancaman non-militer dapat berasal dari berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi. Antisipasi ancaman non-militer sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Ancaman non-militer dapat memiliki dampak yang serius terhadap stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dari aspek stabilitas politik, ancaman non-militer seperti konflik politik, ketidakstabilan pemerintahan, atau ketidakpuasan sosial dapat mengganggu stabilitas politik suatu negara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian, ketegangan sosial, dan bahkan konflik bersenjata. Dengan mengantisipasi ancaman tersebut, negara dapat

mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas politik.

Sedangkan dari aspek pertumbuhan ekonomi, ancaman non-militer seperti krisis ekonomi, ketidakstabilan keuangan, atau bencana alam dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat menghambat investasi, perdagangan, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dengan mengantisipasi ancaman ekonomi tersebut, negara dapat mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ber-kelanjutan.

Monografi yang ditulis oleh Dekan Fisipol Universitas Sawerigading Makassar ini hadir untuk memperkaya khasanah referensi tentang kajian politik pembangunan, keamanan nasional, dan geopolitik. Karena itu, melalui buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh kalangan. Melalui buku ini dapat memotivasi dan memacu dosen, peneliti, mahasiswa, dan pemerhati pertahanan negara untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan agar terus menuangkan ide dan pemikirannya. Wassalam.

Makassar, Juni 2023

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan 1
A. Urgensi Pertahanan Nasional 1
B. Problematika Pertahanan Nasional di Daerah 14
C. Beberapa Contoh Kasus 15
D. Konsep dan Dasar Pemikiran 18

Bab 2 Paradigma Pembangunan 22
A. Pengertian Paradigma 22
B. Paradigma Keamanan Nasional 25
C. Regulasi tentang Pertahanan dan Keamanan 27
D. Perspektif Teori tentang Keamanan Nasional 30

Bab 3 Pertahanan dan Pembangunan Daerah 50
A. Pembangunan di Sulawesi Selatan 50
B. Kondisi Wilayah Sulawesi Selatan 53
C. Dimensi Ancaman 72
D. Isu Strategis dan Indikasi 86

Bab 4 Spektrum Strategis Geopolitik 92
A. Dimensi Strategis 92
B. Spektrum Geopolitik Global 97
C. Spektrum Geopolitik Regional 99
D. Spektrum Geopolitik Nasional 105

Bab 5 Penutup 111
A. Kesimpulan 111
B. Rekomendasi 124

Daftar Pustaka 128

Tentang Penulis 132

Bab 1
Pendahuluan

A. Urgensi Pertahanan Nasional

Perkembangan sistem pemerintahan merupakan cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tataran utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling ketergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan itu sendiri. Sistem pemerintahan tersebut berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, pada bidang ideologi, politik, sosial dan budaya (Ipoleksosbud), keselamatan umum, teknologi dan legislasi.

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan namun terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini adalah untuk mendorong otonomi daerah dan mendorong pembangunan daerah menjadi lebih pesat. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijalankan secara langsung. Undang-undang yang mengatur adalah UU No 32/2004. Pemerintah pusat memiliki wewenang sepenuhnya dalam hal pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, pendidikan, dan agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD. Sistem pemerintahannya yaitu negara berdasarkan hukum (*rechsstaat*). Dengan kata lain, penyelenggara pemerintahan tidak berdasarkan pada kekuasaan lain (*machsstaat*), dengan berlandaskan pada hukum ini, maka Indonesia bukan negara yang bersifat abso-

lutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Semenjak lahirnya reformasi pada akhir tahun 1998, bangsa dan negara Indonesia telah terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.

Sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa ancaman bagi negara dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni ancaman militer dan ancaman Nonmiliter. Ancaman militer merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mencegah dan menghadapi, demi mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk ancaman Nonmiliter sesungguhnya dibutuhkan upaya kerjasama dari semua elemen masyarakat dan pengambil kebijakan juga kementerian maupun lembaga hingga sampai pada tataran pemerintah daerah dan elemen masyarakat yang ikut berperan secara aktif sesuai dengan bentuk dan macam ancaman Nonmiliter yang akan terjadi.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka bentuk pertahanan NKRI dapat berupa pertahanan yang sifatnya militer dan juga Nonmiliter. Kemudian pertahanan negara menjadi sebuah

sistem yang disebut dengan Sistem Pertahanan Negara yang kemudian di dalam Pasal 1 peraturan perundangan ini dijelaskan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Selanjutnya Pasal 3 Ayat (2) dijelaskan bahwa Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan yang kemudian saat ini telah bernama Kementerian Pertahanan. Di dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI. Di dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berkaitan dengan Tugas Pokok TNI maka diaturlah bahwa Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kemudian, Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan pula dengan lebih detil bahwa Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan; (1) operasi militer untuk perang; dan (2) operasi militer selain perang, meliputi; (a) mengatasi gerakan separatisme bersenjata; (b) mengatasi pemberontakan bersenjata; (c) mengatasi aksi terorisme; (d) mengamankan wilayah perbatasan; (e) meng-

amankan objek vital nasional yang bersifat strategis; (f) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; (g) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; (h) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (i) membantu tugas pemerintahan di daerah; (j) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; (k) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; (l) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; (m) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); dan (n) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan

Berdasarkan tugas pokok tersebut tampak bahwa Tugas Pokok TNI tidak hanya yang bersifat militer dengan perang, namun juga memiliki tugas yang berkaitan dengan non perang atau Nonmiliter. Tugas Pokok TNI yang berkaitan dengan Nonmiliter, dapat diidentifikasi dengan ancaman Nonmiliter yang mengancam sebuah negara. Ancaman Nonmiliter tersebut dapat terjadi di dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keselamatan umum, teknologi, dan juga aparat serta penegak hukum. Selain itu TNI juga memiliki Tugas Pokok untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dapat juga membantu terhadap bencana alam, dan dapat juga membantu kegiatan yang sifatnya kemanusian lainnya. Maka sudah selayaknya TNI dan pemerintah saling bersinergis dalam rangka melakukan tugas pertahanan negara. Dimana pemerintah daerah juga harus

melaksanakan pertahanan negara termasuk di daerahnya, dan TNI sebagai alat pertahanan, dapat bahu membahu dalam menjaga keutuhan, keamanan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ancaman Nonmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor Nonmiliter dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman Nonmiliter diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud), keselamatan umum, teknologi dan legislasi.

Ancaman ideologi yang dimaksud adalah paham komunis, paham zionis, dan pengaruh paham liberalisme. Dalam hal ini paham komunis merupakan paham yang tidak sesuai dengan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa Indonesia, dimana Bangsa Indonesia sangat mengakui adanya Tuhan, masyarakat Indonesia sangat menghormati HAM, sangat menjunjung tinggi budaya Gotong Royong, serta banyak Keyakinan Agama dan Budaya sebagai warisan dari para leluhur yang sangat majemuk. Selanjutnya ideologi zionis adalah gerakan politik ekstrim orang-orang Yahudi yang berupaya endirikan sebuah Negara Yahudi di Palestina, oleh karenanya melalui gerakan tersebut diharapkan bisa memerintahkan dunia seluruhnya. Sedangkan paham liberalisme merupakan paham yang menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di segala bidang, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan di bidang politik, bidang ekonomi maupun bidang agama.

Indonesia yang saat ini memiliki jumlah penduduk 257.912. 349 penduduk (data BPS Juni 2016) telah mengalami banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan tersebut ditunjuk-

kan melalui terjadinya dinamika sosial yang ada di negara sedang berkembang yang merupakan suatu keniscayaan yang tidak terhindarkan. Namun demikian, hal yang tetap harus diwaspadai adalah gagasan radikalisme yang ada dinamika sosial tersebut, baik yang sifatnya nampak terlihat secara nyata maupun yang tidak terlalu terlihat.

Mencermati fenomena isu radikalisme yang terjadi di Indonesia tidak pelak lagi menjadi sebuah sorotan yang mendalam sebagaimana yang terdapat dalam pemberitaan terkait aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan radikalisme ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*-Negara Islam Irak dan Syam) di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi dalam aksi serangan teror bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu pada Hari Rabu, 24 Mei 2017. Teror naas tersebut mengakibatkan lima orang meninggal dunia, termasuk dua diantaranya merupakan terduga pelaku bom bunuh diri dan dua belas orang mengalami luka serius. ISIS mengklaim bahwasanya kelompoknya yang melakukan aksi teror tersebut yang mereka siarkan melalui media ISIS, Amaq News Agency yang dilakukan oleh Militan ISIS (*liputan6.com*, diakses pada 11 Juni 2017). Terdapatnya berbagai macam argumentasi dan alasan yang sifatnya lebih struktural dan panjang dapat menjadi pemicu, sehingga kelompok ISIS melakukan aksi terornya.

Ancaman Nonmiliter yang sifatnya ke arah politik diantaranya merebaknya kasus korupsi yang melibatkan dan menyeret para elite politik itu sendiri. Kasus korupsi tersangka suap kasus anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU Pera) yang menimpa anggota DPR-RI dari Komisi V Fraksi PAN daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Andi Taufan Tiro. Atas perbuatannya, Taufan yang merupakan anggota DPR RI asal Sulsel ini, dijerat pasal 12 huruf a dan b atau

pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat 1 KUHP (*rakyatsulsel.com*, diakses 11 Juni 2017).

Ancaman Nonmiliter dibidang ekonomi adalah terjadinya pengangguran, kelaparan, kemiskinan, terjadinya persaingan secara ketat produsen barang, pangan/jasa dari dan dalam luar negeri. Sebagaimana yang diumumkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang. Angka ini sekitar 10,86% dari jumlah penduduk nasional. Dalam hal ini, maka BPS membagi data kemiskinan menjadi penduduk miskin perkotaan dan pedesaan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berjumlah 280 ribu orang pada Maret 2016. Sedangkan untuk penduduk miskin daerah pedesaan sejumlah 220 ribu orang (*m.tempo.co*, diakses 11 Juni 2017).

Bidang sosial budaya adalah lunturnya budaya gotong-royong, berubahnya sifat dan perilaku warga akibat meniru budaya luar, kesantunan yang mulai pudar, tidak perduli bila budaya Indonesia diklaim negara lain. Kebudayaan Indonesia yang pernah dikalim oleh Negara Malaysia adalah Wayang Kulit sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Namun pada akhirnya tepatnya tanggal 27 November 2003 UNESCO mengakui Wayang Kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia (*citizen6.liputan6.com*, diakses 11 Juni 2017). Sementara untuk keselamatan umum adalah Pembangunan Makassar New Port (disingkat MNP) yang memiliki pengaruh dan dampak bagi TNI AL/Lantamal VI. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pembangunan MNP memiliki dampak dan pengaruh terhadap keberadaan Lantamal VI, bilamana dikaitkan dengan rencana pembangunan

kekuatan TNI AL di masa yang akan datang, dimana di wilayah Makassar akan dibangun sebagai Markas Komando Armada Tengah sebagai bagian dari rencana pembangunan wilayah pertahanan Negara (Baca: Mabesal 2016. Postur TNI Angkatan Laut Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2024. Perkasal Nomor 06 Tahun 2016 Tanggal 26 April 2016.).

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang telah menghasilkan perubahan arah dan bentuk ancaman serta berpedoman pada kebijakan nasional di bidang pertahanan melalui perhitungan kekuatan TNI AL yang memiliki kemampuan untuk mengatasi ancaman dalam dua *trouble spot* dan satu kekuatan cadangan dengan tetap menggunakan pendekatan tugas dan mempertimbangkan kemampuan dukungan anggaran dari pemerintah (Baca: Mabesal. 2016. Kebijakan Dasar Pembangunan TNI AL Menuju Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*). Perkasal Nomor 05 Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), pada pasal 7 huruf a menyatakan bahwa kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Mamminasata, meliputi pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara serta pasal 8 huruf e, yang menyatakan bahwa strategi pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, salah satunya dilaksanakan dengan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.

Namun pada faktanya, pembangunan MNP telah mempersempit ruang wilayah pertahanan laut Lantamal VI, utamanya aspek Fasilitas Pelabuhan (Faslabuh) dikarenakan tidak tersedianya daerah

lego jangkar bagi unsur-unsur operasi sesuai yang dipersyaratkan sebagai Pangkalan TNI AL kelas A bahwa daerah laut yang harus disediakan di depan dermaga operasi maupun dermaga lainnya untuk tempat kapal lego jangkar dengan minimal 2 (dua) mil persegi (Baca: Mabesal. 2013. Buku Petunjuk Administrasi Standarisasi Pengkalan TNI AL (PUM-03). Keputusan Kasal No. 1771/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013). Pembangunan MNP memiliki dampak terhadap peningkatan intensitas lalu lintas kapal yang hilir mudik pada alur pelayaran di sekitar Pelabuhan dan di Selat Makassar serta mempersempit ruang gerak/Manuvra kapal yang akan keluar masuk dan sandar di dermaga Lantamal VI yang berpotensi menimbulkan kerawanan terjadinya kecelakaan di samping itu juga tidak tersedianya area lego jangkar unsur-unsur operasi sesuai yang dipersyaratkan untuk Pangkalan TNI AL kelas A (Baca: Komando Armada Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL VI. 2017. Kajian Tentang Pengaruh Pembangunan Makassar New Port dan Dampaknya Bagi TNI AL/Lantamal VI. Pangkalan Utama TNI AL VI). Selanjutnya kejahatan *cyber crime* (kejahatan dunia maya) adalah serangan *Virus Rassomware Wanna Cry* yang saat ini membuat resah yang telah berakibat menyerang berbagai fasilitas yang terhubung lewat fasilitas jaringan internet. Pada kasus di Indonesia virus ini telah berhasil menyerang perangkat komputer yang terdapat pada rumah sakit RS Dharmais dan RS Harapan Kita di Jakarta (*sulsel.rakyatku.com*, diakses 11 Juni 2017).

Hasil penelitian oleh Badan Pusat Statistik, tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Kehidupan Bernegara yang dilakukan pada tahun 2011, menghasilkan sebuah hasil bahwa 80% masyarakat mengetahui bahwa UUD 1945 sebagai Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, sementara dalam kondisi yang lain yang mengetahui NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pilar Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara hanya sekitar 67-78%. Hal ini memberikan gambaran kekhawatirkan terhadap pilar kehidupan berbangsa dan bernegara saja yang diketahui masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Selanjutnya penelitian yang sama dinyatakan bahwa terdapat 10,6% masyarakat perkotaan yang tidak bisa menyebutkan secara lengkap bunyi sila Pancasila, serta 14% pada masyarakat desa dan 9% pada masyarakat elit.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujungpandang yang terletak di 0°12'-8° Lintang Selatan dan 116°48'-122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 Km². Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan. Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 9.352.424 jiwa dengan pembagian 4.471.332 orang laki-laki dan 4.881.092 orang perempuan. Pada tahun 2016, penduduk di Sulawesi Selatan sudah mencapai 9.352.424 jiwa.

Posisi yang strategis tersebut, perlu kiranya melakukan perencanaan pembangunan yang tepat dan komprehensif. Dalam proses perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan diharuskan menyusun sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan memetakan pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan dengan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih yaitu visi misi Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H., M.M. dan Wakil Gubernur Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.S., yang memiliki visi "*Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Kesejahteraan Masyarakat*". Untuk

mewujudkan visi tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Misi sebagai berikut:

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Kesemua visi dan misi tersebut harus dijabarkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan RPJMD. Selain dari pada itu kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 7,78% pada tahun 2008 dan tumbuh sebesar 6,20% tahun 2009 atau 7,34% (tanpa nikel); Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I tahun 2010 mencapai 7,77% dan diperkirakan pada Triwulan II mencapai 8,02%; PDRB tahun 2009 (ADHK) sebesar Rp 47,31 Triliun dan 99,90 Triliun (ADHB); dan Pendapatan Perkapita Rp 12,63 Juta pada tahun 2009. Sementara untuk kondisi sosial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan tahun 2008 mencapai 70,22%; Angka Harapan Hidup 69,60 tahun 2008; Penduduk miskin 12,31%% tahun 2009 yang berjumlah 963,6 ribu; Tingkat Pengangguran 8,90% pada tahun 2009 yang berjumlah 296.559 orang (*sulselprov.go.id*, diakses 11 Juni 2017). Potret kemajuan dari pelaksanaan pemerintahan, dapat digambarkan dari

indikator ekonomi makro dan sosial yang terus mengalami perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2016 sebesar 7,41%, lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 7,17%. Pertumbuhan ini melampaui pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 5,02%. Dengan pencapaian ini, menempatkan Sulsel pada urutan ketiga secara nasional setelah Sulawesi Tengah dan Papua. Dengan demikian pertumbuhan ini memberikan konstribusi terhadap nilai PDRB Sulsel, atas dasar harga berlaku yang mengalami kenaikan sebesar Rp.38 triliun lebih dari Rp.341 triliun lebih di tahun 2015, menjadi Rp.379 triliun lebih di Tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi umumnya berpengaruh pada laju inflasi. Inflasi di Sulsel mengalami penurunan sebesar 5,67% dari 8,61% di tahun 2014, menurun menjadi 2,94% di tahun 2016.

Pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan banyak ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung percepatan pembangunan. Dalam analisis pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya dibagi dalam dua kategori yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Pada aspek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saat ini Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki KEK, dan pada RKP 2016 belum ada daerah di Sulawesi Selatan yang akan dikembangkan menjadi KEK. Sementara itu, arah pengembangan Kawasan Industri (KI) berada di luar Pulau Jawa yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi dan meningkatkan efisiensi sistem logistik dan KI sebagai pergerakan utama pusat-pusat pertumbuhan baru. Saat ini KI di Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Kecamatan Pajakukang Kabupaten Bantaeng dengan luas lahan sekitar 3000 hektar yang kegiatan utamanya *integrated industry ferronikel, stainless steel,* dan produk hilir lainnya (Baca:

Seri Analisis Pembangunan Wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).

Mewujudkan stabilitas keamanan dan rasa aman serta ketertiban lingkungan di Sulawesi Selatan bukanlah suatu hal mudah, sepele, nan gampang, terlebih lagi bila dihadapkan dengan kompleksitas dan kemajemukan etnis, budaya, dan perilaku masyarakat Sulawesi Selatan. Stabilitas keamanan dengan tetap menjunjung tinggi sendi dasar Demokrasi merupakan kunci mendasar mewujudkan kesejahteraan. Perwujudan kesejahteraan sangat memerlukan stabilitas keamanan sebagai penopang utama pesatnya pertumbuhan perekonomian dan sendi sendi kesejahteraan masyarakat. Provinsi Sulawesi Selatan terutama di wilayah perkotaan beberapa tahun terakhir disuguhkan berita-berita adanya fenomena Begal dan premanisme jalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor).

Salah satu contoh aksi para begal di Kota Makassar yang menelan korban nyawa, Musyarrafah adalah seorang aktivis Muhammadyah yang juga merupakan Wakil Ketua Nasyatul Aisyah Provinsi Sulawesi Selatan meregang nyawa setelah tak kuasa melawan aksi begal. Begal dan kekerasan jalanan menjadi teror tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Koran lokal setiap harinya seolah tidak pernah luput memberitakan aksi para preman jalanan ini. Menyaksikan semakin maraknya aksi begal, maka tidak salah jika sebagian masyarakat menganggap Kota Makassar dan Sulawesi Selatan semakin tidak aman. Aksi begal bukan hanya persoalan kenakalan remaja biasa,tapi sudah menjurus pada kejahatan luar biasa.

Pemerintah Sulawesi Selatan kedepan harus serius dan wajib melakukan segala upaya untuk mencegah semakin maraknya perilaku kejahatan jalanan ini. Karena jika tidak, maka rakyat tidak

akan percaya lagi dengan pemerintahnya dan dalam tataran masyarakat demikian, rakyat akan bergerak dengan logika hukumnya sendiri. Masalah ekonomi dan kondisi sosial dapat membuat orang menjadi nekat. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial bisa menjadi kambing hitamnya. Oleh karena itu program pemberantasan kemiskinan wajib digalakkan oleh pemerintah provinsi maupun daerah untuk menekan tingginya angka kriminalitas di Sulawesi Selatan guna menyelesaikan akar masalah stabilitas keamanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Kinerja dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di tengah-tengah masyarakat dan pemberdayaan aparatur RT dan RW untuk mengawasi perilaku warga wajib dimaksimalkan guna membantu aparatur penegak hukum mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Kerjasama dan komunikasi intens antar pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah juga berperan penting dalam upaya memantapkan stabilitas keamanan dan jaminan rasa aman serta ketertiban lingkungan di Sulawesi Selatan.

B. Problematika Pertahanan Nasional di Daerah

Urgensi pertahanan nasional sebagaimana diuraikan di atas masih menyisahkan beberapa permasalahan dalam konteks pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinergitas pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
2. Belum optimalnya strategi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

3. Belum optimalnya penerapan regulasi terhadap pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

C. Beberapa Contoh Kasus

Beberapa hasil kajian oleh para penulis sebelumnya tentang Sinergitas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Guna Menghadapi Ancaman Nonmiliter Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Secara mendasar para penulis tersebut, memiliki penekanan yang berbeda dalam memandang sistem pertahanan dan keamanan negara, kajian yang dilakukan oleh Kusnanto Anggoro (2003), tentang keamanan nasional, pertahanan negara, dan ketertiban umum. Poin utama yang dihasilkan adalah era millenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan. Fenomena itu adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa. Dengan globalisasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu telah memporakporandakan kerangka lama hubungan antar negara dan secara berarti mengubah gravitasi politik domestik negara-negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu memengaruhi "keamanan nasional" (*national security*) suatu negara. Sebab itu, masa transisi dari negara otoriter menuju negara demokrasi memerlukan berbagai penataan ulang perundangan yang mengatur tentang "keamanan nasional".

65 Kajian yang dilakukan oleh Heru Susetyo (2008), tentang menuju paradigma keamanan komprehensif berperspektif keamanan manusia dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Poin utama dari kajian tersebut adalah diskusi masalah keamanan Negara

Kesatuan Republik Indonesia setelah meraih kemerdekaannya, dinilai masih sangat kompleks akan adanya ancaman sistem keamanan yang dapat memperpecah sistem keamanan dan ketahanan negara. Olehnya itu, maka sistem keamanan nasional secara komprehensif dinilai masih perlu dioptimalkan, dinilai saat ini maraknya aksi upaya pemecah belah bangsa dan negara melalui aksi-aksi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu pula, faktor ancaman lainnya adalah keterbelakangan ekonomi yang diakibatkan adanya ketimpangan sosial yang terjadi di wilayah pusat dan daerah sebagai bentuk ketimpangan ekonomi yang dinilai masih sentralistik.

Hasil penelitian dilakukan oleh Mirtusin (2010), tentang tugas pertahanan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Poin utama dari hasil penelitian ini adalah reformasi sektor pertahanan dan Keamanan selama kurang lebih delapan tahun di Indonesia meski mengalami kemajuan yang relatif baik, tapi masih membutuhkan beberapa pembaruan. Lembaga-lembaga yang terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan masih belum profesional dalam merumuskan peran masing-masing, meski sudah merevisi doktrin. Perlu dipertegas peran dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut, dalam keamanan dalam negeri, karena merupakan wilayah abu-abu yang berpotensi terjadinya konflik kedua lembaga. Sesungguhnya keberadaan UU Keamanan Nasional sebagai payung legal menjadi begitu penting bagi aktor keamanan seperti TNI, Polri, maupun intelijen. Tanpa adanya perundang-undangan payung tersebut, koordinasi yang buruk, serta bentrok antar aparat di lapangan niscaya akan sulit untuk diminimalisir.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Petronila (2013), tentang peran militer dalam pembangunan pertahanan dan ke-

amanan di Kalimantan Timur. Poin utama adalah peran militer dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan khususnya korem 091/Aji Surya Natakesuma di Kalimantan Timur dengan memfokuskan pada 3 (tiga) peran dari operasi militer selain perang yaitu mengamankan objek vital nasional, mengamankan tamu negara setingkat dengan kepala negara yang sedang berada di Kalimantan Timur dan Membantu menanggulangi akibat bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusian. Dalam masa damai seperti saat ini, Korem 091/Aji Surya Natakesuma harus mampu beradaptasi dalam menghadapi tantangan global untuk menjaga pertahanan Negara khususnya Kalimantan Timur. Oleh karena itu, peran militer dalam pembangunan sangatlah diperlukan untuk mendukung dan mempercepat proses pembangunan demi tersentuhnya masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan Negara. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah pengerahan pasukan, komunikasi, saranadan prasarana, logistik, kondisi sosial dan kondisi cuaca. Data yang dipersentasekan dalam tulisan ini bersumber dari penelitian lapangan selama 4 minggu di Korem 091/Aji Surya Natakesuma, 2013 di Kalimantan Timur.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013), tentang optimalisasi penyelenggaraan pertahanan wilayah perbatasan pendekatan *human security* dalam rangka mendukung ketahanan wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Poin utama hasil penelitian adalah penyelenggaraan pertahanan di wilayah perbatasan Entikong belum maksimal yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap beberapa daerah terpencil, belum tertibnya lalu lintas barang dan manusia melalui jalan tradisional dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam pertahanan wilayah. Ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan

sarana prasarana dasar (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), ketergantungan ekonomi masyarakat Indonesia di perbatasan terhadap Malaysia, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan piranti lunak tentang pertahanan non-militer.

D. Konsep dan Dasar Pemikiran

1. Sinergitas mengandung arti kombinasi atau bagian yang dapat menghasilkan luaran lebih baik dan lebih besar.
2. Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Pembangunan Wilayah adalah bagian dari Pembangunan Nasional, berupa rangkaian program dan kegiatan meliputi perencanaan, pengauran, pembangunan, pengembangan, pengawasan, pembinaan, pengamanan dan perlindungan wilayah yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta dilaksanakan dengan moral dan etika yang sesuai dengan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
4. Ancaman adalah segala usaha dan kegiatan, yang datangnya dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
5. Ancaman Militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan dinilai memiliki kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa bila

tidak segera ditangani. Hal tersebut berupa agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, teroris, pemberontakan bersenjata, dan lain-lain.

6. Ancaman Nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun jika dibiarkan akan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Hal tersebut dapat dilihat melalui perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, imigrasi gelap, *human trafficking,* pencurian sumberdaya alam, praktik korupsi kolusi nepotisme, dan lain-lain.
7. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai benuk ancaman dan gangguan.
8. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta disipakan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara penuh rasa tanggung jawab, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Kemenhan RI tentang Doktrin Pertahanan Negara, 2007).
9. Sistem Pertahanan Semesta adalah pelibatan seluruh rakyat dan segenap tumpah sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan negara yang utuh dan menyeluruh.

Kerangka pemikiran dalam bagian ini merupakan landasan filosofis berpikir dalam mengeksplorasi dan menelusuri jejaring informasi berkaitan dengan sinergitas pembangunan di Provinsi

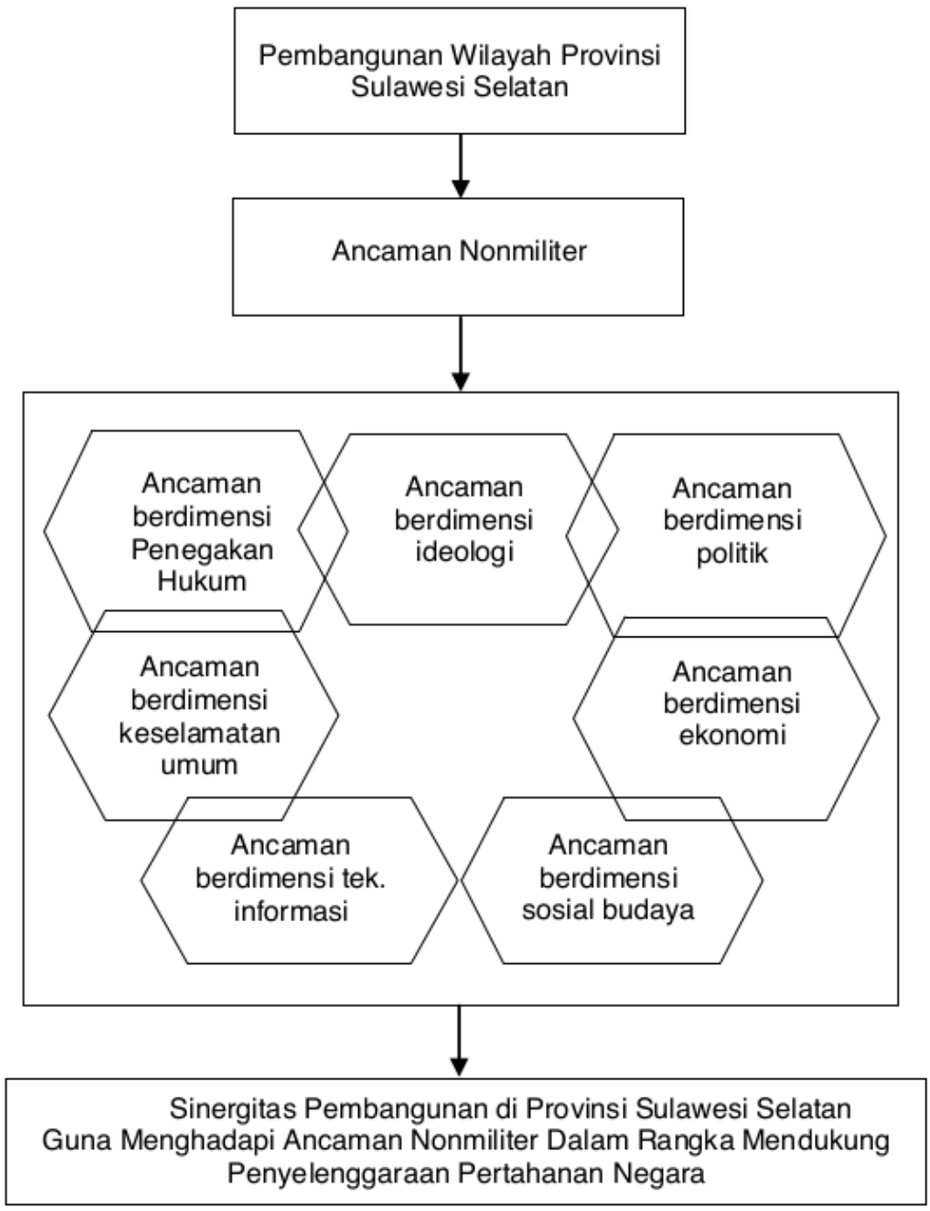
Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Landasan pertama adalah dengan melakukan penelusuran informasi terhadap bentuk sinkronisasi kebijakan dan regulasi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Untuk memperoleh data tersebut langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya telaah kepustakaan yang bersumber dari reverensi yang mutakhir dan berkaitan dengan tujuan kajian.

Langkah yang kedua adalah membuat strategi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Kondisi ini dianggap memiliki aspek urgensi yang sangat dominan disebabkan hampir disetiap wilayah yang terdapat di Indonesia memiliki tingkat kerawanan di atas rata-rata, sehingga dianggap sangat perlu untuk merumuskan strategi yang dinamik dalam rangka memberikan kontribusi yang efektif sesuai dengan tipologi wilayah.

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan eksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadapi ancaman fenomena nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara dengan melakukan upaya pengumpulan data dengan melakukan sinkronisasi data melalui *member check* yang selanjutnya diarahkan dan dipetakan faktor tersebut sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

Dengan demikian untuk lebih singkatnya uraian pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pertahanan Negara dapat dilihat pada bambar berikut ini.


Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Ancaman Nonmiliter
Ancaman berdimensi Penegakan Hukum
Ancaman berdimensi ideologi
Ancaman berdimensi politik
Ancaman berdimensi keselamatan umum
Ancaman berdimensi ekonomi
Ancaman berdimensi tek. informasi
Ancaman berdimensi sosial budaya
Sinergitas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Guna Menghadapi Ancaman Nonmiliter Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pertahanan Negara

Bab 2
Paradigma Pembangunan

A. Pengertian Paradigma

Kata paradigma berasal dari bahasa inggris "*paradigm*" yang berarti model, pola, atau contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional (www. empatpilarkebangsaan.web.id.), misalnya: (1) pem-bangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis, (2) pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata, (3) pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa, (4) pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka, dan (5) pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan

struktural, adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya individu atau warga Negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur sosial yang tidak adil.

1. Makna pembangunan nasional. Makna pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, soaial dan budaya, dan Hankam untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.
2. Hakekat pembangunan nasional. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya umumnya. Wujud manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan trampil, berbudi luhur, berakhlak mulia, desiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, dan mampu membangun diri dalam rangka membangun bangsanya.
3. Tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termasuk dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan RI dan lingkup pergaulan internasional yang merdeka dan berdaulat.
4. Sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan Negara yang disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Baca: id.wikipedia.org, diakses 11 Juni 2017).
5. Hakekat pertahanan negara adalah segala upaya perta-hanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada

kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dan lain-lain. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan (Baca: id.wikipedia.org, diakses 11 Juni 2017).

6. Tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan RI. Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara.

   Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi; (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan; (2) pengelolaan barang milik/kekayaan menjadi

tanggung jawab Kementerian Pertahanan; (3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan; (4) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah (Baca: www.kemhan.go.id, diakses 11 Juni 2017).

B. Paradigma Keamanan Nasional

1. Pancasila sebagai landasan Idiil. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai landasan idiil menjadi sumber dari segala sumber hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, karena butir-butir Pancasila memiliki nilai-nilai luhur sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang mencerminkan suatu tatanan nilai keseimbangan dan keselarasan bagi persatuan, kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam segala aktivitas kehidupan bangsa, sehingga segala sesuatu yang terjadi merupakan cerminan dari ideologi yang sudah menjadi jatidiri bangsa. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti disebutkan di atas, pelaksanaan pembangunan hendaknya dapat dilaksanakan secara harmonis, serasi dan selaras sehingga terwujud sinergitas dengan mengaktualisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ketiga dan kelima agar diperoleh suatu kesamaan cara pandang dalam membangun Provinsi Sulawesi Selatan untuk menuju ke masa depan yang lebih baik.
2. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum nasional, dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan secara teknis pengaturannya disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. NKRI adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan

wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dari ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan memerlukan Ketahanan Nasional dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud cara pandang, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk ketangguhan dari segenap komponen bangsa guna mempertahankan integritas nasional.

3. Wawasan nusantara sebagai landasan visional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup (Alfandi, 2002). Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya serta sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
4. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

C. Regulasi tentang Pertahanan dan Keamanan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025. RPJPN sebagai arah da-lam menentukan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selain dari pada itu, maka RPJPN juga merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi dan misi serta arah pembangunan nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai amanat UUD NRI 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas oto-nomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas ke-pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerata-

an, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut diharapkan Pemerintah daerah dapat mengatur dan memprioritaskan kepentingan daerahnya, pembangunan dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan sistem *buttom up* sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan kesejahteraan dapat tercapai.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan mengimplementasikan UU ini maka sinergitas antar daerah otonom diharapkan akan dapat dilaksanakan oleh pelaku pembangunan sehingga tercipta integritas dan sinkronisasi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah, terjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkadilan dan berkelanjutan.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk memperkokoh dan meningkatkan ketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antar pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Selain itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan

ruang sebaik mungkin sesuai aspek geografi dengan pende-katan kesejahteraan dan pertahanan keamanan.

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pembangunan di daerah melalui otonomi daerah harus berpedoman pada RPJMN agar dapat bersinergi antar daerah otonom dalam rangka ke-tahanan nasional. Agar dapat selaras dengan rencana pem-bangunan nasional, maka masing-masing kepala daerah me-lalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara konsisten menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN 2015-2019 ini adalah merupakan tahapan ketiga dengan penekanan prioritas pada pembangunan nasional untuk mencapai ke-daulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan, mengarahkan pembangunan untuk mencapai pening-katan kesejahteraan berkelanjutan dengan mendorong war-ga negara memiliki jiwa gotong royong dan harmonis dalam kehidupan antar kelompok sosial.
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Mencermati Pasal 7 ayat 2 bahwa sistem pertaha-nan negara dalam menghadapi ancaman militer menempat-kan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung (Baca: UU No. 3 Tahun 2002). Amanat perundang-undangan tersebut menegaskan keterlibatan komponen bangsa untuk berperan serta dalam pertahanan negara, termasuk juga pada imple-mentasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang meru-pakan bagian dari NKRI.

7. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Mencermati pada Pasal 7 (1) tentang Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas pokok itu dilakukan melalui OMP (Operasi Militer untuk Perang) maupun OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Implikasi dari tugas pokok TNI tersebut mengisyaratkan TNI bersama seluruh komponen bangsa berperan serta dalam mewujudkan pertahanan di daerah, termasuk diantaranya menghadapi ancaman non militer di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Perspektif Teori tentang Keamanan Nasional

1. Problem kontemporer sistem keamanan di Indonesia. Masalah keamanan dan ketidakamanan tidak identik dengan ancaman fisik ataupun kemiliteran belaka. Paul Hoffman (2004) menyebutkan bahwa bagi ratusan juta penduduk dunia saat ini, salah satu sebab timbulnya ketidakamanan (*insecurity*) hidup mereka adalah bukan semata-mata terorisme, namun kemiskinan berlebihan (*extreme poverty*). Saat ini, lebih dari satu milyar penduduk bumi (dari total enam milyar) hidup hanya dengan pendapatan setara satu dollar perhari (Susetyo, 2016).

   Penelitian dari Peace Research Institute (PRIO) Oslo dan Uppsala Conflict Data Program (2002) menyebutkan bahwa perang sipil (*civil wars*) ataupun konflik internal (*internal conflict*) di suatu negara menyebabkan kematian

lebih banyak dari pada konflik bersenjata antara negara (*armed forces*) dengan pemberontak ataupun gerakan separatis. Berbanding 1000 kematian pertahununtuk perang sipil dengan 25 kematian per tahun untuk konflik vertikal antara negara dengan pemberontak ataupun gerakan separatis. Diantara sebab tidak langsung terjadinya perang sipil adalah kemiskinan, kelaparan, ketimpangan distribusi pendapatan, maupun pemindahan paksa (*forced displacement*).

Toms dan Ron (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan nasional berpengaruh sebagai disebabkan oleh terjadinya konflik. Data statistik menyebutkan konflik berpotensi lahir di negara dengan *Gross Domestic Bruto* (GDP) perkapita rendah. Logika dari asumsi ini adalah bahwa negara miskin kurang memiliki angkatan bersenjata yang efisien dan taat hukum. Angkatan bersenjatanya malah seringkali memerangi gerakan oposisi. Negara miskin juga cenderung lemah dalam pelayanan sosial namun sebaliknya memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Menyebabkan lahirnya diskriminasi dan ketidaksetaraan (*inequality*) antar rakyat.

Kemiskinan dan kelaparan memang bukan penyebab utama terjadinya konflik. Sedikit sekali penelitian ilmiah yang membuktikan korelasi antara keduanya. Namun demikian, kemiskinan dan kelaparan adalah sebab tidak langsung terjadinya konflik. Penelitian PRIOOslo dan Uppsala (2002) menghadirkan relasi yang jelas antara kemakmuran nasional dengan perdamaian. Hanya satu dari tiga puluh negara terkaya di dunia yang mengalami konflik. Sebaliknya, pada saat yang sama tujuh belas dari tiga puluh satu negara termiskin mengalami konflik.

Asumsi ini dapat membantu menjelaskan sebab terjadinya konflik di Indonesia. Sebagian besar konflik yang terjadi sepuluh tahun terakhir (1998–2008) di Indonesia adalah bukan konflik bersenjata antara negara (TNI/POLRI) dengan gerakan separatis, namun lebih bersifat konflik internal ataupun perang sipil antar pihak dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Poso-Sulteng, Maluku, Sambas-Kalbar, Sampit-Kalteng, dan Sanggau Ledo-Kalbar dalam kurun waktu 1998–2003. Di antara penyebab konflik sipil di tempat-tempat tersebut adalah tidak semata-mata perseteruan etnis ataupun agama belaka. Namun bercampur dengan kepentingan politik, kemiskinan dan rendahnya pendidikan, serta ketidakpuasan dalam hal distribusi pendapatan. Pemikiran Frances Stewart (dalam Dewi Fortuna Anwar, *et.al.*, 2005:183) menyebutkan: "*although every situation is unique, there are some predisposing cultural, political and economic condition that are conducive to conflict.*"

Kemiskinan dan kelaparan adalah problem yang amat serius di Indonesia. Di awal tahun 2008 ini ada anak SD yang bunuh diri karena kelaparan di Magetan. Ibu hamil tua dan anak ketiganya tewas karena kurang gizi di Makassar. Lima warga NTT meninggal karena busung lapar. Tiga peristiwa di bulan Februari-Maret 2008 ini mungkin bukan tergolong peristiwa luar biasa di Indonesia. Banyak orang kelaparan di negeri ini, kendati tidak banyak yang kemudian mati maupun tidak terberitakan ketika mati.

Sesungguhnya kelaparan dan kemiskinan adalah peristiwa yang sangat serius. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Millenium Development Goals* (MDGs)-nya yang diluncurkan pada tahun 2000 menetapkan sasaran pertama

dari delapan sasaran MDGs adalah mengurangi kemiskinan dan kelaparan yang berlebihan (*eradicate extreme poverty and hunger*). Prestasi *Human Development Index* (HDI) Indonesia di tahun 2007 juga tidak terlalu menggembirakan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan UNDP (2008) dengan indikator antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tersebut, Indonesia menempati ranking ke 107. dengan indeks 0.728. Masih di bawah Malaysia (yang tergolong berHDI tinggi), Thailand, Philippina, dan Vietnam. Bahkan Palestina (*Occupied Palestinian Territory*) masih sedikit lebih baik dari Indonesia. Di Asia Tenggara, Indonesia hanya lebih unggul dari Laos, Myanmar, Cambodia, dan Timor Leste.

2. Menuju sistem keamanan komprehensif perspektif keamanan manusia. Sesungguhnya, doktrin ketahanan nasional di Indonesia dengan metode ASTAGATRA-nya dan UUNo. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sudah mendekati paradigma keamanan alternatif dengan bentuk keamanan komprehensif (*comprehensive security*). Dewi Fortuna Anwar (ISEAS, 2000) menyebutkan:

   "...this concept is very similar to the doctrine of comprehensive security in its multidimensional approach to security. Security is not merely seen in military terms, but encompass a much wider spectrum, including economic, political, and social aspects..."

   Kendati demikian, dalam aplikasi di dalam kehidupan masarakat, paradigma komprehensif dalam ketahanan nasional ini nyatanya tidak terlalu nampak. Tetap saja dominasi pendekatan kemiliteran lebih terasa. Mutthiah Alagappa (1988) menyebutkan bahwa:

"*National resilience doctrine in Indonesia represented, among other things, its military dominated…regime`s quest for legitimacy and survival in the face of domestic competition for political power*".

Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Mely Caballero Anthony (2004) menyebutkan bahwa:

At least three states in the region Indonesia, Malaysia, and Singapore have developed their own versions of comprehensive security, Indonesia`s for example, has been expressed in the idea of Ketahanan Nasional (national resilience), which also became its security doctrine starting from the Suharto erainthemid-1960s. Ketahanan Nasional was presented as a comprehensive view of security to include political, economic, socio cultural, and military aspects covering both the domestic and the international environments. In-ward-looking in orientation, the concept placed emphasis on the survival of the regime, which at that time proved vulnerable to domestic problems stemming from such threats as communism and economic recession.

Deviasi ini dapat dipahami dari kenyataan bahwa doktrin Ketahanan Nasional memang dikembangkan oleh militer Indonesia sebagai suatu doktrin keamanan holistik sebagai respon terhadap konflik politik dan keamanan dalam negeri di akhir tahun 1960-an. Tidak lama setelah berkuasanya pemerintahan Orde Baru.

Robert Cribb (dalam Dewi Fortuna Anwar, *et.al.*, 2005) menyebutkan:

"*…New order had been founded in a welter of anti-communist violence and that the New Order was characteristically harsh in its treatment of dissent and brutal in its*

response to rebellion."

Terkait dengan peran militer di masa Orde Baru, Riwanto Tirtosudarmo (dalam Dewi Fortuna Anwar, *et.al*, 2005) menyebutkan:

During the New Order, economic development thus joined harmony and national integration as the favorite buzz words used by military elites. While the latter perceived their mission as facing the perceived threats to national unity and integration...meanwhile, the military successfully enshrined the dual function of the military (Dwi Fungsi ABRI) *that legitimized their involvement in social and political affairs.*

Justifikasi dari pendekatan keamanan komprehensif yang condong aspek kemiliteran ini terlihat juga pada pengertian keamanan pada UU Pertahanan Negara tahun 2002 dan Undang-Undang TNI Tahun 2004. Kedua Undang-Undang tersebut memandang keamanan nasional dari sisi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah secara geografis dari segala ancaman dan gangguan.

Perkembangan sosial politik dan pertahanan keamanan kontemporer menghendaki pengembangan paradigma keamanan nasional yang tidak berpusat pada keamanan militer dan territorial saja. Ancaman yang menganggu stabilitas dan integrasi nasional kini lebih banyak berasal dari dalam negeri dengan sebab-sebab yang tidak bersifat kemiliteran. Maka, perluas memperluas paradigma keamanan nasional dari keamanan komprehensif (*comprehensive security*) versi ketahanan nasional yang bertumpu pada keamanan militer (*military security*) menuju keamanan komprehensif yang bertumpu pada keamanan manusia (*human security*).

Keamanan manusia (*human security*) menjadi pilihan karena konsep ini secara komprehensif mampu menjembatani kepentingan keamanan antara kepentingan keamanan militer dengan keamanan ekonomi, pangan, energi, pribadi, politik, komunitas, dan keamanan lingkungan. Norwegia, Canada dan Jepang, Norwegia, adalah diantara negara yang telah menerapkan *human security* dalam kebijakan keamanannya. Kondisi ketiga negara tersebut terbukti memiliki keamanan nasional yang relatif solid dan skor *Human Development Index* (HDI) yang sangat tinggi, masing-masing di urutan 2, 4, dan 8 pada tahun 2007 (UNDP, 2008).

3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Politik, ekonomi, sosial budaya dan pembangunan hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik masyarakat Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai pelaku politik bukan sekadar objek politik. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Berdasarkankondisitersebut maka sistem politik Indonesia harus dikembangkan asas kerakyatan sesuai dengan sila Ke-IV Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Sementara pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi adalah sistem ekonomi yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem

ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek.

Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara.

Dalam ekonomi kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus untuk kemakmuran/kesejahteraan rakyat yang harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga. Politik ekonomi kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, danusaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program kongkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebihmandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan

mampu memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, negarayang demokratis memiliki peran memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya adalah hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab.

Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam si seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa.

Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan

ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu sesuai sila kedua. Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara/ penghubung/penengah antara hak negara dan hak asasi individu.

Sementara pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum adalah salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasartersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) me-

miliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila.

Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat) (Kurniawan, 2011).

4. Bentuk ancaman Nonmiliter. Ancaman Nonmiliter atau ancaman Nir Militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman Militer. Ancaman Nonmiliter merupakan ancaman yang tidak bersifat fisik, serta bentuknya yang tidak terlihat, seperti pada ancaman Militer, karena ancaman ini melingkupi dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi serta keselamatan umum. Meskipun ancaman Nonmiliter tidak menggunakan senjata, namun bilamana dibiarkan begitu saja, juga dapat berdampak terhadap kedaulatan serta keutuhan wilayah dari

suatu negara, selain itu juga dapat membahayakan keselamatan segenap bangsa. Komponen pokok dalam rangka menghadapi ancaman Nonmiliter ini merupakan lembaga pemerintah yang berada di luar bidang pertahanan, sesuai dengan bentuk serta serta karakteristik ancaman yang tengah dihadapi yang mendapatkan dukungan dari unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Adapun lembaga pemerintah yang menghadapi adanya ancaman Nonmiliter yakni; Polri, KPK, DPR, Satpol PP, dan lembaga-lembaga Pemerintahan yang sifatnya sangat berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa. Bentuk ancaman Nonmiliter diuraikan sebagai berikut:

a. Ancaman berdimensi ideologi

Ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan (liberalisme) sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Upaya dalam menghadapi atau menangkal ancaman ini adalah dengan kebijakan serta langkah-langkah politik yang tepat serta intensif dalam mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila, serta konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara.

Strategi untuk menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan yang berlapis. Lapis terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur-unsur pertahanan Nonmiliter, yakni departemen yang membidangi ideologi. Departemen serta unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam negeri akan mengerahkan seluruh kekuatan politik serta instrumen pemerintahan di dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah

dalam menghadapi ancaman berdimensi ideologi, sementara itu, departemen serta unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri mengerahkan segala jajarannya yang tersebar dalam setiap negara untuk penguatan langkah serta upaya diplomasi dalam menangkal usaha-usaha pihak lain yang bisa mengancam ideologi Pancasila. Unsur pemerintah yang membidangi informasi mendominasikan kekuatan nasional pada bidang informasi untuk melakukan "operasi informasi imbangan". Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan memberikan pengajaran serta kesadaran akan ideologi Pancasila yang secara bertingkat dan berlanjut pada para siswa dan mahasiswa pada semua tingkat dan jenjang pendidikan.

Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra dari pemerintah dalam menyinergikan strategi dalam membentengi masyarakat dari berbagai ancaman penetrasi ideologi asing yang bisa membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara. Peran lapis pertahanan militer di dalam hal ini diwujudkan dalam program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Titik berat pelaksanaannya dengan peningkatan komunikasi sosial TNI yang bersinergi dengan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh unsur-unsur terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing, terutama dalam materi non fisik. Komunikasi sosial TNI diselenggarakan dalam format peningkatan kesadaran bela negara, dengan memanfaatkan program bela negara di lingkungan pekerjaan, pendidikan, serta permukiman dalam rangka revitalisasi Pancasila.

b. Ancaman berdimensi politik

Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti contohnya Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Dalam menghadapi ancaman Nonmiliter yang berdimensi politik, pertahanan Nonmiliter di dalam bidang politik menjadi unsur serta kekuatan utama yang dibantu oleh unsur terkait yang lainnya, termasuk kekuatan dari unsur pertahanan militer. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan dengan melalui 2 macam pendekatan, yakni. *Pertama.* Menggunakan Pendekatan ke Dalam adalah pembangunan serta penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan merupakan terciptanya stabilitas politik di dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi.

Kedua. Pendekatan keluar yang diarahkan untuk mendinamisasikan strategi beserta upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerja sama dan saling percaya dengan negara-negara yang lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antar negara, yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional, hingga global.

c. Ancaman berdimensi ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan pertahanan yang berdaya tangkal. Bahkan, kondisi perekonomian nasional yang cukup tinggi tersebut menjadi daya tangkal pertahanan yang cukup efektif. Tantangan perekonomian Indonesia ke depannya diperhadapkan dengan era komunitas bebas ASEAN 2015, dengan produk-produk asing akan masuk dengan bebas dan bersaing dengan produk dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukanlah upaya akselerasi pembangunan perekonomian nasional yang berdaya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi yang datang dari aspek internal, prioritas kebijakan bisa berupa penciptaan lapangan kerja dengan padat karya sebagai solusi untuk memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta pemilihan teknologi yang tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dalam aspek eksternal, Indonesia harus membangun serta menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi di dalam negeri. Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi

ekonomi, mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan Nonmiliter. Keterlibatan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan usaha pertahanan dalam menciptakan kondisi keamanan nasional yang bisa terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas serta kebutuhan pokok masyarakat, terutama pada daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak bisa untuk dijangkau dengan sarana transportasi umum. Program Bakti TNI yang melibatkan kerja sama dengan unsur terkait di daerah maka lebih ditingkatkan pada perbaikan sarana prasarana masyarakat yang membawa dampak dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

d. Ancaman berdimensi sosial budaya

Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta dengan konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Ancaman yang berdimensi sosial budaya ini bisa dibedakan atas 2macam ancaman, yaitu; (1) ancaman dari dalam; dan (2) ancaman dari luar. *Pertama.* Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan. Isu-isu ini menjadi titik pangkal dari segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat berurat berakar, bencana sebagai akibat perbuatan dari manusia. Isu-isu ini lama kelamaan menjadi kuman penyakit yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, serta patriotisme. Watak dari kekerasan yang melekat dan berurat berakar

berkembang seperti api yang ada pada sekam di kalangan masyarakat yang menjadi pendorong konflik-konflik antar masyarakat atau konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada dasarnya timbul sebagai salah satu akibat dari masih melekatnya sikap kekerasan dalam diri. Watak kekerasan ini pula yang mendorong tindak kejahatan, termasuk dalam pengrusakan lingkungan dan bencana buatan manusia. Faktor-faktor tersebut berproses secara meluas serta menghasilkan efek domino sehingga bisa melemahkan kualitas bangsa Indonesia.

Kedua. Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya yang dari luar negeri sulit dibendung memengaruhi tata nilai hingga kepada tingkat lokal. Kemajuan dari teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antar masyarakat yang terjadi secara langsung. Sebagai bentuk akibatnya, terjadi benturan tata nilai, sehingga lambat laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin terdesak, seperti nilai-nilai individualisme, konsumerisme dan hedonisme.

Dimensi sosial budaya yang menjadi ancaman yang melemahkan bangsa Indonesia diantaranya seperti peredaran narkotika serta obat-obatan yang terlarang, bisa mengancam para generasi muda Indonesia. Di samping itu juga faktor *human trafficking* (perdagangan wanita dan anak) selain mengancam moral juga menjadi salah satu media penyebaran virus HIV/AIDS. Penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang susah dibendung seringkali menyebabkan terjadinya benturan peradaban yang bisa me-

ngancam nilai-nilai serta kearifan lokal maupun nasional, sehingga ketahanan nilai-nilai budaya merupakan suatu bentuk keniscayaan.

e. Ancaman berdimensi teknologi informasi

Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut, seperti contohnya kejahatan *cyber* dan kejahatan perbankan.

f. Ancaman berdimensi keselamatan umum

Ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi.

g. Ancaman berdimensi penegakan hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *'law enforcement'* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum'dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law'versus 'the rule of just law*'atau dalam istilah *'the rule of law and not of man'*versus istilah *'the rule by law'* yang berarti '*the rule of man by law'*.

Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang

formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah *Supreme Court of Justice*.

Bab 3
Pertahanan dan Pembangunan Daerah

A. Pembangunan di Sulawesi Selatan

Secara umum Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan salah satu Provinsi yang letaknya sangat strategis. Terletak di Kawasan Indonesia Bagian Timur yang memiliki beragam macam suku dan budaya dengan berbagai macam bahasa dan simbol budayanya. Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu pilar dan gerbang bagi pengembangan dan pembangunan Indonesia. Pada kondisi faktual, Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan daerah pengembangan yang memiliki akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sangat siginifikan yang ditopang oleh beberapa Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang berkualitas, sehingga saling bersinergi guna mendukung Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi yang masuk dalam kategori pengembangan di Kawasan Timur Indonesia.

Fenomena pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan juga sejalan dengan konsep Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo, yang mengumandangkan Program Nawacita guna mendukung percepatan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bagi pembangunan Bangsa Indonesia secara adil dan merata. Namun demikian kondisi tersebut juga hendaknya didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembangunan ekonomi guna memperlancar akses transportasi baik melalui jaringan darat, udara, dan laut yang memiliki fasilitas pendukung sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga dalam mengakses jaringan transportasi tersebut seluruh

komponen masyarakat dapat menggunakannya secara optimal.

Beranjak dari Program Nawacita sebagaimana yang diprogramkan oleh Bapak Joko Widodo, maka Indonesia juga seyogyanya didukung oleh sistem pertahanan dan keamanan yang komprehensif mencakup seluruh lapisan masyarakat secara luas dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan yang dimaksud adalah penguatan dan perlindungan, jaminan keselamatan, jaminan keamanan bagi seluruh lapisan elemen masyarakat guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Elemen masyarakat diharapkan melibatkan diri dalam rangka mendukung sistem pertahanan dan keamanan untuk mencegah dan mengantisipasi masuknya paham-paham zionis dan paham komunis, serta paham-paham aliran radikalisme yang menelurkan jaringan teroris sebagaimana yang terjadi saat ini.

Indikasi masuknya jaringan teroris di Provinsi Sulawesi Selatan dikatakan oleh Kombes Pol. Frans Barung Mangera, wilayah hukum di Provinsi Sulawesi Selatan rawan menjadi tempat persembunyian teroris karena secara geografis berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Kelompok teroris yang dimaksudkan adalah Kelompok Jaringan Teroris Santoso, diduga berpencar dan kabur ke daerah-daerah perbatasan untuk bersembunyi. Penangkapan dua terduga teroris di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menjadi bukti adanya pelarian teroris Poso ke Sulawesi Selatan (*m.tempo.co*, diakses 17 Juni 2017).

Selain dari pada itu ancaman nonmiliter lainnya yakni berdimensi sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya ini juga dapat melemahkan bangsa Indonesia. Narkotika dan Zat Aditif merupakan ancaman berdimensi sosial budaya, sampai saat ini juga masih menjadi mimpi buruk bagi warga masyarakat utamanya per-

edarannya di tengah warga masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana data yang dilansir oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil penelitian Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bahwa, pengguna narkoba di Indonesia sebanyak 4,2 juta orang. Sedangkan terkhusus di Sulawesi Selatan, pada Tahun 2016 sebanyak 130.000 orang (*www.kabar.news*, diakses 27 Juni 2017). Dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia, Sulawesi Selatan menempati posisi ke-13 dalam peredaran narkoba. Posisi tersebut menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan dengan kerentanan peredaran narkoba relatif sedang (*regional.kompas.com*, diakses 27 Juni 2017).

Selanjutnya ancaman Nonmiliterberdimensi sosial budaya juga meliputi aksi begal yang masih marak terjadi di kawasan yang luput dari pengawasan petugas keamanan yang tidak segan untuk melukai korbannya. Selain dari pada itu, juga aksi tindak pencurian/perampasan dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan tidak jarang melukai korbannya bilamana melakukan perlawanan saat aksinya diketahui oleh korbannya. Aksi begal ini sudah menjadi fenomena yang menggurita ditengah kehidupan warga masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan kelompok ini umumnya melakukan aksinya di kota-kota yang memiliki jumlah penduduk padat. Semakin maraknya kasus begal tentunya menjadi keprihatinan kita semua, tidak hanya karena persoalan terampasnya rasa aman masyarakat, tetapi juga terkait dengan trennya yang semakin meningkat yang dominan pelakunya adalah anak remaja. Data dari Kepolisian dan Kejaksaan di Kota Makassar mengkonfirmasi bahwa trend kasus dan perkara kekerasan jalanan mengalami peningkatan dalam dua tahun terkahir. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Instansi Kejaksaan Negeri Makassar, sejak Bulan

Januari hingga Bulan Oktober 2015, kasus begal di Makassar naik 74,02 persen pelakunya berusia 14 hingga 16 tahun, 194 remaja telah ditetapkan tersangka begal di Kejari Makassar. Sejak tahun 2014-2015, ada sekitar 254.442 kasus begal yang ditangani oleh aparat Kepolisian (*kompasiana.com*, diakses 27 Juni 2017).

B. Kondisi Wilayah Sulawesi Selatan

1. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak pada bagian selatan Pulau Sulawesi memiliki luas wilayah kurang lebih 45.764,53 Km^2. Terdiri dari 24 kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar yakni sekitar 7.502,68 Km^2 atau 16,40 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sementara itu kabupaten/kota dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Parepare dengan luas sekitar 99,33 Km^2 atau kurang lebih 0,22 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Diantara kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah otonom baru di daerah ini, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 1.151,47 Km^2 atau 2,52 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan. Secara geografis posisi Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 116° 48'-122°36' Bujur Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Batas Sebelah Barat dan Selatan masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores.

b. Luas Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan tiap-tiap kabupaten/kota yang terdiri dari 24 kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Luas Daerah menurut kabupaten/ kota Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/kota	Luas (Km^2)	Persen	Keterangan
1	Luwu Utara	7.502,68	16,40	
2	Luwu Timur	7.001,61	15,30	
3	Bone	4.559,00	9,96	
4	Luwu	2.918,65	6,38	
5	Wajo	2.516,20	5,50	
6	Tana Toraja	2.054,30	4,49	
7	Pinrang	1.961,77	4,29	
8	Gowa	1.883,32	4,12	
9	Sidrap	1.883,25	4,12	
10	Enrekang	1.786,01	3,90	
11	Maros	1.619,12	3,54	
12	Soppeng	1.359,44	2,97	
13	Barru	1.174,71	2,57	
14	Bulukumba	1.154,67	2,52	
15	Toraja Utara	1.151,47	2,52	
16	Pangkep	1.112,29	2,43	
17	Selayar	903,50	1,97	
18	Jeneponto	903,35	1,97	
19	Sinjai	819,96	1,79	
20	Takalar	566,51	1,24	
21	Bantaeng	395,83	0,87	
22	Palopo	247,52	0,54	
23	Makassar	175,77	0,38	
24	Pare-Pare	99,33	0,22	
Provinsi Sulawesi Selatan		45.764,53	100,00	

Sumber: Diolah menggunakan data dasar BPS Prov. Sulsel, 2016.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah penduduk

Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan *update* 02 Maret 2017, sejumlah 8.432.163 Jiwa. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 4.116.737 Jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan sejumlah 4.315.426 Jiwa. Tersebar di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/ Kota

No	Kabupaten/Kota	Populasi		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepulauan Selayar	61.813	66.931	128.744
2	Bulukumba	192.684	215.091	407.775
3	Bantaeng	88.012	94.271	182.283
4	Jeneponto	170.873	182.414	353.287
5	Takalar	136.350	147.412	283.762
6	Gowa	348.706	360.680	709.386
7	Sinjai	114.383	122.114	236.497
8	Maros	164.008	171.588	335.596
9	Pangkep	154.608	165.685	320.293
10	Barru	81.705	88.611	170.316
11	Bone	352.081	386.434	738.515
12	Soppeng	106.206	119.503	225.709
13	Wajo	187.215	204.765	391.980
14	Sidrap	139.606	146.804	286.610
15	Pinrang	176.484	187.603	364.087
16	Enrekang	99.490	98.704	198.194
17	Luwu	170.701	176.395	347.096

18	Tana Toraja	115.310	112.248	227.588
19	Luwu Utara	150.702	149.287	299.989
20	Luwu Timur	138.479	130.926	269.405
21	Toraja Utara	112.680	111.323	224.003
22	Makassar	706.814	722.428	1.429.242
23	Pare Pare	67.217	69.686	136.903
24	Palopo	80.410	84.493	164.903
Sulawesi Selatan		4.116.737	4.315.426	8.432.163

Sumber: Diolah menggunakan data dasar BPS Prov. Sulsel, 2016.

b. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 45.764,53 Km^2, terdiri dari 24 kabupaten/kota dengan kepadatan pendududk di tiap-tiap kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel 3.3 Jumlah Kepadatan Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Luas Km^2	Jumlah	Kepadatan Penduduk Orang/Km^2
1	Kepulauan Selayar	903,50	128.744	142
2	Bulukumba	1.154,67	407.775	353
3	Bantaeng	395,83	182.283	461
4	Jeneponto	903,35	353.287	391
5	Takalar	566,51	283.762	501
6	Gowa	1.883,32	709.386	377
7	Sinjai	819,96	236.497	288
8	Maros	1.619,12	335.596	207
9	Pangkep	1.112,29	320.293	288
10	Barru	1.147,71	170.316	145
11	Bone	4.559,00	738.515	162
12	Soppeng	1.359,44	225.709	166
13	Wajo	2.506,20	391.980	156

14	Sidrap	1.883,25	286.610	152
15	Pinrang	1.961,17	364.087	186
16	Enrekang	1.786,01	198.194	111
17	Luwu	3.00,25	347.096	116
18	Tana Toraja	2.054,30	227.588	111
19	Luwu Utara	7.502,68	299.989	40
20	Luwu Timur	6.944,88	269.405	39
21	Toraja Utara	1.151,47	224.003	195
22	Makassar	175,77	1.429.242	8131
23	Pare Pare	99,33	136.903	1378
24	Palopo	247,52	164.903	666
Sulawesi Selatan		45.764,53	8.432.163	184

Sumber: Diolah menggunakan data dasar BPS Prov. Sulsel, 2016.

3. Kondisi Sosial

a. Bidang Ideologi

Dalam konteks Sulawesi Selatan, pola Islamisme secara garis besar terdapat setidaknya (untuk sementara) tiga pola yakni, *pertama*, pola para Datuk yang suksesmengislamkan raja-raja di Sulawesi Selatan; *kedua,* pola kedua yakni pola Kahar Muzakkar yang melakukan pemberontakan/perlawanan kepada pemerintah yang bertujuan mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII); *ketiga*, polaKomite Penersiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang sebahagian dapat dipandang sukses dengan menggunakan pendekatan stuktural politik. Di dalam polaitu, ada varian-varian Islamisme yang tidak tunggal, Islamisme berwajah sangat jamak yang tentu memerlukan kajian yang serius untuk menunjukkan varian-varian itu, varian itu boleh dilihat dari aktivisme Wahdah Islamiyah, Hidayatullah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, kemudian halaqah-halaqah kecil yang eksis di Sulawesi

Selatan seperti Salafy, Jama'ah Tabligh dan lain-lain. Selain itu, boleh dilihat dalam pendekatan struktural dengan melihat kebijakan politik pemerintah, baik propinsi maupun kabupaten terkait cita-cita ideologi-politik Islam yang mengusung formalisasi syari'at Islam dalam institusi pemerintahan di Sulawesi Selatan. Kehadiran Islam di Sulawesi Selatan merupakan titik sejarah baru yang mengubah tatanan masyarakat terutama dalam kehidupan politik kerajaan dan sistem religi.

Dalam kehidupan politik Islam telah menjadi fenomena baru sebagai agamakerajaan terutama di Gowa yang berarti masuk dalam struktur kekuasaan. Padaakhirnya kemudian mengalami proses politik dengan adanya penaklukan terhadapkerajaan-kerajaan lain di wilayah kepulauan Sulawesi Selatan. Secara politis, dakwah selanjutnya sudah berada dalam tangan penguasa (raja). Selanjutnya adalah gerakan yang dipelopori oleh Kahar Muzakkar. Tokoh ini adalah dianggap sebagai orang yang "berjihad" memberlakukan kembali syariat Islam sebagai wujud penolakan atas pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta dan terhadap pengaruh komunis di sulawesi Selatan pada awal tahun 1951-an yang terkenal dengan gerakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII).

Kehadiran gerakan Islam di Sulawesi Selatan secara sosiologis hadir dalam konteks dan manifestasi yang kompleks, baik yang melekat dalam dinamika internal umat Islam, maupun dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia secara eksternal. Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang bersifat sosiologis yang memberikan dorongan sekaligus menjadi lahan subur bagi tumbuhnya gerakan Islam yang cenderung melakukan Islamisasi yang formalistik dalam negara dengan karakternya yang legal-formal, doktriner, dan militan. Kehadiran gerakan-gerakan Islam ideologis seperti yang diperlihatkan oleh HTI, MMI, KPPSI, dan kelompok-kelompok penegak

formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan. Keberadaan Islamisme di Sulawesi Selatan secara khusus sangat terkait dengan keberadaan eksistensi dua organisasi besar Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) yang selama ini membanggakan diri sebagai arus utama Islam moderat di Indonesia dinilai sudah mengalami kebuntuan inovasi dan kreativitas dalam menyikapi perkembangan yang ada. Gagasan Islam dan Keindonesiaan yang menjadi platform keduanya seakan kehilangan daya tawarnya ketika adanya kecenderungan mengeksploitasi organisasi mereka untuk tunggangan politik. Sebaliknya, fenomena yang disebut gerakan Islamisme menyeruak saat masyarakat mengalami disorientasi. Islamisme seakan menjadi wahana baru di balik kebuntuan Muhammadiyah dan NU dalam menyuarakan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalambingkai keindonesiaan.

b. Bidang Politik

Secara umum situasi politik di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini berkembang secara dinamis dan kondusif yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, yang dibuktikan melalui banyakna Partai Politik yang melakukan kontestasi politik pada ajang pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan bebas menentukan pilihannya yang ditandai dengan beraneka ragamnya pilihan yang mereka kehendaki untuk dijadikan sebagai wakil rakyat maupun kepala daerahnya.

Sementara itu, untuk situasi partai politik saat ini berkembang secara baik dan pesat diatndai dengan tingkat partisipasi pemilih masyarakat yang semakin meningkat. Saat ini partai politik yang memiliki jumlah perolehan kursi terbesar di parlemen Provinsi Sulawesi Selatan adalah Partai Golkar dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 11 kursi, disusul urutan kedua Partai Gerindra

dengan jumlah kursi sebanyak 11 kursi, dan peringkat ke tiga di tempati oleh Partai Demokrat dengan jumlah perolehan 11 kursi. Pada tahun 2018 mendatang di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengadakan perhelatan ajang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mereka yang saat ini akan bertarung adalah pasangan Nurdin Halid (Calon Gubernur) berpasangan Azis Qahar Muzakkar (Calon Wakil Gubernur), Nurdin Abdullah (Calon Gubernur) berpasangan Syamsuddin Sulaiman (Calon Wakil Gubernur), Ikhsan Yasin Limpo (Calon Gubernur) berpasangan Muzakkar (Calon Wakil Gubernur), dan Agus Arifin Nu'mang (Calon Gubernur) berpasangan Mustika Aliyah Ilham Arief Sirajuddin (Calon Wakil Gubernur). Para kontestan tersebut akan bertarung dan berkontestasi pada Tahun 2018 melalui jalur partai politik hingga jalur non partai politik.

c. Bidang Ekonomi

1) Potensi pertambangan/galian

Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki berbagai potensi mineral dan bahan galian, seperti biji nikel di Luwu Timur; batuan tras/gamping di Pangkajene Kepulauan; dan pasir besi di Takalar. Di Kabupaten Wajo terdapat deposit gas alam yang cukup besar. Nikel merupakan salah satu komoditas utama dalam pertambangan di Sulawesi Selatan. Bahkan ekspor Sulawesi Selatan terbesar saat ini, merupakan komoditas nikel dan semua produksinya diekspor ke negeri Sakura/Jepang.

2) Potensi Pertanian dan Peternakan

Beberapa komoditi pertanian Sulawesi Selatan mampu di-ekspor ke luar negeri. Terdapat enam komoditas ekspor sektor pertanian Sulawesi Selatan yang memiliki nilai ekspor tertinggi dalam kurun waktu 2012-2014. Dari keenam komoditas tersebut kakao, Biji-bijian berminyak, ikan dan udang memiliki nilai ekspor paling

besar. Pada Tahun 2014 ekspor kakao mencapai 250,14 Juta US$, dan merupakan yang paling besar. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa mengekspor pertanian kita dengan menjadikannya produk dengan nilai jual yang lebih besar lagi. Petani-petani di Sulawesi Selatan yang mengolah hasil perkebunannya sebagian besar terdapat di Kabupaten Selayar, Pangkep dan Barru. Sedangkan jenis tanaman perkebunan yang diolah oleh petani adalah jambu mete, kelapa dan kemiri. Khusus untuk komoditas kemiri, banyak diolah oleh petani subsektor perkebunan di Kabupaten Barru, terutama di Kecamatan Soppeng Riaja. Subsektor perikanan mulai menggeser dominasi perkebunan sebagai penyumbang terbesar kedua dalam PDRB sektor pertanian Sulawesi Selatan. Komoditas perikanan unggulan Sulawesi Selatan adalah rumput laut, bandeng dan udang.

3) Potensi subsektor Peternakan

Provinsi Sulawesi Selatan populasi ternak besar pada keadaan 1 mei 2013 mencapai 1,1 juta ekor yang didominasi oleh sapi sebanyak 73.153 ekor. Jumlah ternak besar naik 71% dibandingkan tahun 2003 dan menduduki peringkat 3 secara nasional. Selain itu, sebanyak 11.274 rumah tangga memelihara ternak besar bukan untuk tujuan usaha. Jumlah populasi ternak besar yang tidak digunakan untuk usaha adalah 18 ribu ekor. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 tersirat bahwa masyarakat Sulawesi Selatan memiliki sifat dasar mandiri, yang diharapkan mampu memanfaatkan sumberdaya alam dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal sehingga mampu menghasilkan produk pertanian spesifik yang memiliki keunggulan lokal. Kebijakan sektor pertanian ini pun terus digulirkan oleh pemerintah setempat, seperti bantuan berbagai paket bibit pertanian. Selain itu, pemberian modal juga dilaksanakan

untuk pengembangan usaha mikro kecil dan pengembangan wira-usaha perdesaan.

4) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sekitar 300.124,22 milyar rupiah. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai nilai tambah paling besar dibandingkan sektor lain yaitu mencapai 68.437,42 milyar rupiah. Selanjutnya disusul oleh sektor Industri Pengolahan terbesar kedua dengan nilai tambah mencapai 41279,07 milyar rupiah. PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2014 sebesar 234.083,97 milyar rupiah atau meningkat sekitar 7.57%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013. Bila melihat nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat bahwa Kota Makassar mempunyai nilai PDRB yang paling besar mencapai 100.026,50 milyar rupiah. Terbesar kedua selanjutnya adalah Kabupaten Luwu Timur dengan nilai PDRB mencapai 20.363,59 milyar rupiah. Sedangkan Kota Bone PDRB terbesar ketiga yang nilainya mencapai 19.739,11 milyar rupiah.

5) Capaian indikator kinerja Jumlah Koperasi Besar

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 yaitu 133,33% atau sebanyak 20 unit koperasi dari 15 unit yang ditargetkan. Akan halnya capaian indikator kinerja Jumlah Usaha Kecil mejadi Usaha menengah yaitu hanya mencapai 90% atau sebesar 118.832 unit belum mampu mencapai target yaitu 131.510 unit. Khusus untuk indikator 4 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pembinaan usaha menengah menjadi usaha besar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga tidak

lagi dicantumkan sebagai indikator kinerja. Sebagai catatan untuk target indikator kinerja Jumlah Wira Usaha Baru tahun 2015 berdasarkan Revisi RPJMD 2013-2018, maka program pengembangan kewirausahaan juga menjadi salah satu yang mengalami perubahan target yang semula akumulasi Jumlah Wira Usaha Baru adalah 132.765 unit menjadi 120.920 unit. Adapun capaian tahun 2015 hanya sebesar 47,18% atau tercapai sebanyak 47.045 unit masih jauh dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh Pemerintan Kabupaten/Kota belum menjadikan program pengembangan kewirausahaan sebagai program prioritas padahal sangat bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dalam hal pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan, PTS/PTN dan perbankan belum sepenuhnya tertarik dengan program kewirausahaan, belum ada regulasi yang mengatur tentang CSR BUMN/BUMD khusus untuk wirausaha baru, skim kredit masih disamakan antara wirausaha baru dengan pengusaha yang sudah eksis.

d. Bidang Sosial Budaya

1) Pariwisata

Wisatawan nusantara, pencapaian Tahun 2015 adalah sebesar 7.128.826 wisnus, bila dibandingkan dengan target yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu 7.000.000 wisnus telah mencapai kondisi 101,84%, sementara itu jumlah wisatawan mancanegara yang ditargetkan mencapai 170.000 wisman pada akhir periode RPJMD, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 sebesar 191.773 wisman, kondisi kinerja yang dicapai telah melampaui target yaitu mencapai 112,80%. Adapun indikator kinerja Jumlah destinasi yang menjadi unggulan, pencapaian Tahun 2015 adalah 2 destinasi, jika dibandingkan dengan target yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yaitu 3 destinasi telah mencapai kondisi 66,66% dari target. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian

target sasaran strartegis ini didukung oleh 3 program yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 10.728.222.000.

2) Pendidikan

(1) Masih tingginya angka buta aksara serta angka artisipasi sekolah cenderung menurun; (2) Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai; (3) Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (4) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat;

3) Kesehatan

Terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta meningkatnya penyakit degeneratif, Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang Gerakan SUN (*Scaling Up Nutrition*) untuk perbaikan Gizi anak atau perbaikan Gizi 1000 hari pertama kehidupan.

4) Kebudayaan

Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya. Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang, masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak, dan terjadinya degradasi nilai budaya dan kearifan lokal.

e. Bidang Keselamatan Umum

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis 24 yaitu "*Meningkatnya kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi luar jawa*" dengan indikator

kinerja yang capaiannya mampu melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian sasaran strategis ini sebesar 100% atau tercapai dengan kualifikasi sangat baik. Sasaran strategis ini menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2015, capaian kondisi mantap jalan provinsi adalah sepanjang 1.003,13 Km (87,42%) dan kondisi tidak mantap sepanjang 144,38 Km (12,58%), dari 1.147,51 Km jalan provinsi. Hal ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2014 yang lalu, dimana capaian kondisi mantap sepanjang 979,64 Km (85,37%) dan kondisi tidak mantap sepanjang 167,87 Km (14,63 %). Capaian kinerja sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 84,57%, mengalami peningkatan capaian sampai pada tahun 2015 dengan kondisi capaian sebesar 87,42%. Kondisi tersebut sesuai dengan yang ingin dicapai pada target jangka menengah. Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan kerja maksimal dalam meningkatkan akses di Provinsi Sulawesi Selatan yang berkontribusi langsung terhadap terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan yang bermutu berkeselamatan. Untuk indikator persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi (konektivitas) di wilayah Provinsi dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2015 sebesar 87,98 %. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran untuk indikator persentase tingkat kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dan persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi Tahun 2015 sebesar Rp. 581.895.322.951,- dengan realisasi Rp. 500.592.720.635,-. Realisasi fisik pada Tahun 2015 mencapai 97,01% dan realisasi keuangan sebesar 86,02%. Tidak optimalnya pencapaian realisasi fisik maupun keuangan pada Tahun 2015 di-

sebabkan karena ada beberapa paket yang tidak bisa dirampungkan sampai akhir Tahun 2015, sehingga harus disilpa dan dilanjutkan penyelesaiannya pada Tahun 2016. Disamping itu ada juga beberapa paket yang putus kontrak sehingga berkontribusi besar terhadap tidak optimalnya penyerapan anggaran pada indikator ini.

Rendahnya capaian pelayanan tranportasi darat, laut dan udara disebabkan beberapa hal yaitu pelaksanaan pembebasan lahan kereta api Makassar-Parepare tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari 30 Km rencana pembebasan lahan untuk kepentingan tersebut, tapi yang berhasil dibebaskan hanya 20 Km saja. Hal itu disebabkan antara lain pemilik lahan belum memiliki kelengkapan dokumen (seperti sertifikat tanah), sehingga tidak dapat dibayarkan, ada beberapa lahan yang tidak jelas pemiliknya/pemiliknya tidak berada di tempat, sehingga tim kesulitan untuk membebaskannya, adanya ketidakpuasan masyarakat atas jumlah ganti rugi yang ditentukan oleh tim appraisal sehingga dilakukan proses konsinyasi di pengadilan. Masih kurangnya animo masyarakat untuk memanfaatkan BRT sehingga halte yang dibangun belum dimanfaatkan seoptimal mungkin. Masih terbatasnya pelayanan transportasi pada masyarakat yang ada pada daerah terpencil perbatasan dan kepulauan yang disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana transportasi di daerah tersebut. Urusan perhubungan laut masih dominasi pemerintah pusat sehingga sulit untuk memaksimalkan pengelolaan pelabuhan lokal dan regional yang ada di wilayah ini. Urusan perhubungan udara, masih dikelola oleh pemerintah pusat, sehingga bandar udara termasuk bandara perintis tidak dapat dimaksimalkan pengelolaannya oleh pemerintah daerah.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan adalah pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat perlu dimaksimalkan untuk me-

minimalisir terjadinya konflik dan penolakan atas pembangunan perkeretapian trans Sulawesi, perlunya sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan bus kota untuk mengurangi kemacetan dalam Kota Makassar, perlu dilakukan penambahan jumlah halte sehingga jumahnya memadai. Juga perlu dilakukan pembenahan manejemen BRT, seperti menambah jumlah armada bus yang melayani masyarakat di koridor yang ada, sehingga waktu tunggu tidak terlalu lama, yang membuat masyarakat enggan untuk menggunakan BRT dan memilih tetap menggunakan angkot (pete-pete) yang menambah kesemrawutan lalu lintas. Perlunya keterpaduan dan dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menyiapkan sarana dan transportasi di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, terutama dukungan regulasi dan anggaran yang memadai. Perlunya koordinasi yang baik agar ada pelimpahan sebagian urusan kepelabuhan dan kebandarudaraan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Program pengembangan/pemeliharaan sarana/prasarana dan pengawasan transportasi darat, program pembangunan transportasi massal, program pembangunan/pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi laut, program pembangunan/pemeliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.117.466.725.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.082.640.480 sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.384.084.520.

f. Bidang Legislasi

Saat ini pengembangan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan yang menghubungkan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan dengan kabupaten/kota yang berada di provinsi Sulawesi Selatan sangat diperlukan karena merupakan salah satu penghambat yang dihadapi dalam membangun wilayah. Infrastruktur yang dimaksud adalah berbasis jaringan transportasi kereta api yang

pengembangannya masih dalam tahap penyelesaian oleh pemerintah. Infrastruktur jaringan kereta api tersebut merupakan harapan dalam memudahkan untuk menjangkau wilayah kabupaten/kota dalam waktu yang singkat. Dalam pembangunan jaringan infrastruktur tersebut, juga diproyeksikan ikut serta membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar Kota Makassar. Melalui metode yuridis normatif, dipilih 12 peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan, Undang-undang yang dipandang spesifik mengatur pengelolaan kawasan perbatasan adalah Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sedangkan pengaturan terkait infrastruktur lebih banyak diakomodir dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksananya.

g. Bidang Teknologi

Banyaknya Provider yang bersaing menyediakan layanan internet di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan dalam mengakses internet. Jaringan internet merupakan jaringan elektronik yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Masyarakat Sulawesi Selatan sebagian besar memanfaatkan internet untuk keperluan interaksi sosial dalam dunia maya seperti *facebook*, *tweeter, instagram, youtube*, dan lain-lain. Namun terdapat juga sekelompok orang yang memanfaatkan internet untuk keperluan bisnis, perbankan atau sekedar belanja *online*. Perkembanganglobal tentunya membuat suatu hal yang tidak dapat dihindarkan lagi akan memberikan dampak positif dan negatif bagi warga masyarakat dan menimbulkan situasi yang dilematis. Kondisi tersebut memunculkan rasa penolakan atau menerima perubahan jaman dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Berdasarkan informasi yang berkembangan dikalangan

masyarakat, ditemukan tidak sedikit orang yang dirasuki *syndrome antipati* terhadap teknologi informasi. Bahkan terdapat juga yang berpikiran telah kehabisan waktu untuk menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang berbasis komputerisasi, lebih baik berada di zona aman yaitu bekerja di lapangan tanpa harus bersentuhan dengan komputer. Namun ada juga yang memiliki niat untuk menguasai komputer lebih dalam, tidak hanya untuk menikmati fasilitas multimedia tetapi sekurang-kurangnya dapat mengoperasikan program dasar fasilitas komputer, disebabkan aplikasi dasar tersebut merupakan yang paling sering digunakan dalam dunia kerja baik swasta maupun pemerintah.

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka membangun daerahnya dituangkan melalui visi "*Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018*". *Pilar Utama Pembangunan Nasional* yaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.

Simpul jejaring yaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi simpu distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul distribusi perhubungan darat, laut dan udara di luar Jawa dan kawasan

timur Indonesia khususnya.

Akselerasi kesejahteraan yaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat ini Indeks Pembangunan manusia berada pada kategori menengah-tinggi. Pembangunan ekonomi berada di atas rata-rata Nasional, pendapatan per kapita sekitar Rp. 30 Juta. Angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini ditandai oleh kondisi dinamis Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut didukung oleh misi sebagai upaya-upaya umum dalam pencapaian visi yaitu:

1) Mendorong semakin meningkatnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
2) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
4) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
5) Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.
6) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.
7) Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Arah kebijakan pada tahun 2015 diprioritaskan melalui:

1) Pengembangan kerjasama dan daya saing daerah:

a) Pengembangan kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Luar Negeri
b) Pengembangan kerjasama kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lain di Indonesia dan Luar Negeri
c) Pengembangan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah;
d) Pengembangan sistem jaringan distribusi komoditas strategis;
e) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja;
f) Penguatan sistem inovasi daerah;
g) Penguatan dukungan pada poros maritim.

2) Pengembangan ekonomi kerakyatan;
3) Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan pembangunan kesehatan;
4) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.
5) Pengembangan kawasan strategis;
6) Pengelolaan sumberdaya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi;
7) Reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.

5. Sinergitas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan

Dihadapkan pada ancaman nonmiliter dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara sebagai berikut:

1) Sinergitas pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman nonmiliter antara lain: pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur, pelayanan pada masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, sedangkan yang berkaitan dengan ancaman nonmiliter belum dicantumkan dalam RPJMD, baik dalam hal kebijakan, stategi, sasaran dan lain-lain, padahal ancaman nonmiliter sangat berpotensi terjadi

mengingat Provinsi Sulawesi Selatan salah satu simpul jaring pembangunan di Indonesia bagian timur.

2) Regulasi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan PTP Kemhan RI dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Negara belum optimal, disebabkan keberadaan PTP Kemhan RI belum dianggap sebagai mitra kerja di daerah. Hal ini dibuktikan ketika rapat musyawarah Rencana Pembangunan Daerah tidak dilibatkan, sehingga PTP Kemhan RI tidak dapat memberikan kontribusi yang erat kaitannya dengan rencana pembangunan wilayah pertahanan di wilayah.

C. Dimensi Ancaman

1. Ancaman Berdimensi Ideologi

Kehadiran gerakan Islam di Sulawesi Selatan secara sosiologis hadir dalam konteks dan manifestasi yang kompleks, baik yang melekat dalam dinamika internal umat Islam, maupun dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia secara eksternal. Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang bersifat sosiologis yang memberikan dorongan sekaligus menjadi peluang bagi tumbuhnya gerakan Islam yang cenderung melakukan Islamisasi yang formalistik dalam negara dengan karakternya yang bersifat legal-formal, doktriner, dan militan. Kehadiran gerakan-gerakan Islam ideologis seperti yang diperlihatkan oleh HTI, MMI, KPPSI, dan kelompok-kelompok penegak formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan tentu memunculkan tanda tanya kepada publik terkait yang mendasari kemunculan dasar gerakan mereka.

Lebih jauh lagi, bahwa keberadaan Islamisme di Sulawesi Selatan secara khusus sangat terkait dengan keberadaan eksistensi dua organisasi besar Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul

Ulama (NU) yang selama ini membanggakan diri sebagai arus utama Islam moderat di Indonesia dinilai sudah mengalami kebuntuan inovasi dan kreativitas dalam menyikapi perkembangan yang ada. Gagasan Islam dan Keindonesiaan yang menjadi platform keduanya seakan kehilangan daya tawarnya ketika adanya kecenderungan mengeksploitasi organisasi mereka untuk tunggangan politik. Sebaliknya, fenomena yang disebut gerakan Islamisme menyeruak saat masyarakat mengalami disorientasi. Islamisme seakan menjadi wahana baru di balik Muhammadiyah dan NU dalam menyuarakan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam bingkai keindonesiaan. Ekspresi politik dan ideologi politik Islam dalam berbagai variannya seperti yang telah dijelaskan di atas akan memengaruhi cara-cara yang digunakan oleh para aktivis politik Islam termasuk di Sulawesi Selatan. Situasi ini sejalan dengan cita-cita politik Islam melalui politik formal dengan menggunakan kendaraan partai politik, parlemen atau melalui birokrasi sebagai ajang permainan politik.

Selain dari pada itu, juga melibatkan berbagai lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Kalaupun harus menggunakan partai politik sebagai instrumen untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan Islam, apakah harus dibatasi pada partai-partai politik yang secara formal mempunyai asal-usul sosial dan "teologis" Islam, atau sebaliknya tetap menggunakan partai-partai yang secara formal "tidak bercirikan" Islam. Setidaknya bahwa Islamisme di Sulawesi Selatan dengan pola pergerakannya cenderung kepada Post-islamisme, yakni sebuah gerakan yang lebih moderen. Artinya bahwa kebanyakan gerakan-gerakan yang ada cenderung lebih akomodatif dengan pemerintah. Kecuali Hizbut Tahrir yang agak lebih konsisten dengan dasar dan visi politik mereka dibandingkan dengan gerakan-

gerakan ideologis lainnya di Sulawesi Selatan. Kecenderungan pergeseran wajah dari Islamisme ke post-Islamisme ini kurang lebih dipengaruhi oleh tiga sumber pengaruh dan tantangan utama, yakni Pengaruh Sistem politik yang ada di Indonesia, munculnya kaum sekuler kritis dan geo-politik. Peran kemitraan diantara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kementerian Lembaga terkait untuk mengawasi dan mengontrol perkembangan ideologi Islamisme juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.

2. Ancaman Berdimensi Politik

Dimensi politik yang menjadi fokus perhatian utama di Provinsi Sulawesi Selatan adalah dalam penyelenggaraan pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diselenggarakan pada Tahun 2018 mendatang. Penyelenggaraan Pemilihan Calon Kepala Daerah ini mendapatkan perhatian serius dari segenap elemen Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Perhatian serius tersebut melalui kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU Prov. Sulsel), Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Aparat keamanan TNI-Polri untuk menjaga dan mengawal pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 mendatang.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unsur pimpinan Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota dalam rangka terlibat untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemilihan Kepala Daerah di tingkat Provinsi. Sinkronisasi tersebut dapat berupa fasilitas keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman yang dapat menciptakan suasana yang kondusif. Partisipasi dan peran kepala daerah di tingkat kabupaten/kota sangat berperan, melalui sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat wajib pilih untuk senantiasa bersikap tenang dan damai dalam rangka menyuarakan aspirasinya kepada salah satu kontes-

tastan yang menjadi figur mereka.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan kerjasama dengan jajaran TNI-Polri melalui bantuan personel dalam rangka mengamankan jalannya pesta demokrasi secara aman dan terkendali. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan dimulai pada tingkat wilayah desa/keluarahan, kecamatan, kabupaten/kota. Disamping itu juga pengamanan pada aspek jaringan objek vital yang dianggap dapat memberi dampak negatif terhadap jalannya pesta demokrasi. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan kerjasama dan koodinasi dengan Kementerian Lembaga yang memiliki wewenang dan tugas dalam rangka mengawasi jalannya pemilihan calon kepala daerah tingkat provinsi. Dengan demikian melalui konsep sinergitas dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan instansi yang terkait, maka proses pemilihan calon kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 berjalan kondusif dan tidak membawa dampak negatif terhadap jalannya pesta demokrasi yang digelar setiap sekali dalam lima tahun.

3. Ancaman Berdimensi Ekonomi

Perekonomian Sulsel triwulan II 2016 tumbuh 8,05%, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2016 yang tercatat 7,43%. Secara sektoral, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh kinerja sektor primer dan tersier yang semakin membaik.

Pada sektor primer didorong oleh meningkatnya sektor pertanian dan pertambangan, sementara pada sektor tersier yaitu sektor jasa keuangan, perdagangan, jasa pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya kinerja seluruh komponen, khususnya konsumsi pemerintah dan investasi. Sementara itu, kinerja ekspor

mengalami perbaikan meski masih dalam fase kontraksi akibat belum pulihnya pasar global. Pada triwulan laporan, kinerja perbankan dalam kondisi baik, sementara transaksi yang tercatat pada sistem pembayaran menunjukkan peningkatan. Namun demikian, pada triwulan III 2016 kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan sedikit melambat, dikarenakan terdapat potensi risiko perlambatan di sektor Pertanian dan sektor Industri Pengolahan. Peluang peningkatan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2016 akan terjadi apabila perkembangan ekonomi global semakin membaik dan terjalin koordinasi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran berjalan lancar.

Dengan demikian untuk mendorong Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan, berikut ini beberapa kebijakan yang dapat disarankan kepada pemerintah daerah: (a) mengakselerasi realisasi belanja pemerintah daerah, khususnya belanja modal yang dialokasikan untuk pembiayaan proyek infrastruktur; (b) membangun sistem monitoring realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang terpadu, dan mewajibkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaporkan pencapaiannya secara rutin (bulanan) kepada pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki informasi dini yang dapat digunakan untuk memacu realisasi anggaran pemerintah daerah di Kabupaten/Kota; (c) merealisasikan nominal anggaran belanja daerah secara disiplin sesuai Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan (RPPB) yang telah ditetapkan; (d) guna memacu kinerja pegawai, realisasi anggaran belanja ini hendaknya dijadikan salah satu indikator kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (e) melakukan akselerasi

pembangunan infrastruktur kemaritiman, baik infrastuktur fisik maupun infrastruktur pendukung, diantaranya dengan melakukan perbaikan berbagai pelabuhan laut, kawasan pergudangan dan memperbaiki akses jalan yang menuju ke pelabuhan, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (f) untuk mendukung program kemaritiman di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun *roadmap* pengembangan industri dasar hingga menengah (*low medium technology*) terutama yang berbasis maritim di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Ancaman Berdimensi Sosial Budaya

Mengenal kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan berarti mengenal adat kebudayaan yang ada di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Terdapat Banyak suku/etnis tapi yang paling mayoritas ada 3 kelompok etnis yaitu Makassar, Bugis dan Toraja. Demikian juga dalam pemakaian bahasa sehari-hari ke 3 etnis tersebut lebih dominan. Kebudayaan yang paling terkenal bahkan hingga ke luar negeri adalah budaya dan adat Tanah Toraja yang sangat khas dan sangat menarik. Lagu daerah propinsi Sulawesi Selatan yang sangat populer dan sering dinyanyikan di antaranya adalah lagu yang berasal dari Makasar yaitu lagu Ma Rencong-rencong, lagu Pakarena serta lagu Anging Mamiri. Sedangkan lagu yang berasal dari etnis Bugis adalah lagu Indo Logo, serta lagu Bulu Alaina Tempe. Sedangkan lagu yang berasal dari Tana Toraja adalah lagu Tondo. Untuk rumah tradisional atau rumah adat di propinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari Bugis, Makassar dan Tana toraja dari segi arsitektur tradisional ke tiga daerah tersebut hampir sama bentuknya. Rumah-rumah adat tersebut dibangun di atas tiang-tiang sehingga rumah adat yang ada di sana mempunyai kolong di bawah rumahnya. Tinggi kolong rumah adat tersebut disesuaikan untuk

tiap tingkatannya dengan status sosial pemilik rumah, misalnya apakah seorang raja, bangsawan, orang berpangkat atau hanya rakyat biasa. Hampir semua masyarakat Sulsel percaya kalau selama ini penghuni pertama zaman prasejarah di Sulawesi Selatan adalah orang Toale. Dengan demikian sejarah serta kesenian dan kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan, bisa disimbolkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Namun, ada baiknya jika kekayaan tersebut bisa dilestarikan. Tentunya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kementerian Lembaga terkait berperan seutuhnya, serta dibantu oleh masyarakat lokal, guna kekayaan kesenian dan kebudayaan yang ada tetap lestari, meskipun arus globalisasi menjadi suatu ancaman tersendiri yang berpotensi untuk memengaruhi kebudayaan lokal di Indonesia.

5. Ancaman Berdimensi Teknologi Informasi

Dimensi teknologi informasi di Provinsi Sulawesi Selatan penerapannya berada di Kota Makassar melalui program *Smart city*. Dalam perumusan kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam *Smart City,* pemerintah Kota Makassar mengambil acuan berdasarkan model kebijakan publik, model kebijakan publik yang menjadi tipikal dari perumusan kebijakan Ranperda tersebut adalah Model Campuran yang terdiri dari Model Elite dan Model Kelembagaan. Disini dapat dipahami bahwa bagaimana kelompok elit memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan dan akan memperlihatkan apakah kebijakan tersebut pada akhirnya merupakan kebutuhan masyarakat atau hanya sebagai preferensi dari kelompok-kelompok elit. Selanjutnya, terdapat beberapa lembaga yang berperan di dalamnya, seperti Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan Dinas komunikasi dan Informatika Kota Makassar, hal ini mengacu pada model kelembagaan, sedangkan Model formulasi kebijakan publik yang digunakan adalah Model Campuran yaitu

Model Elite dan Model Kelembagaan, namun didalam model ini masih terdapat kekurangan yaitu, tidak memainkan Model Teori Kelompok, seharusnya dalam membuat perumusan kebijakan publik tidak lepas dari interaksi kelompok-kelompok sehingga akan mencapai suatu titik keseimbangan yang mengakomodasi berbagai kebutuhan dari kelompok-kelompok dalam Ranperda. Lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM belum ada yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan Kota Dunia yang nyaman untuk semua dengan konsep *Smart City*.

6. Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum

Kondisi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan semakin hari semakin memprihatinkan, terkait rendahnya kualitas disiplin berlalu lintas pengguna jalan. Misi keselamatan jalan seharusnya mengarah pada komitmen saling pengertian dan penghargaan antar sesama pengguna jalan dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas. Pemerintah sejauh ini telah menindaklanjuti kerjasama lintas sektoral peningkatan keselamatan jalan yang meliputi 15 aspek keselamatan jalan lintas sektor. Departemen perhubungan juga telah mencanangkan "*road map to zero accident*" dengan aksi penyusunan rencana umum keselamatan transportasi jalan di Indonesia tahun 2008-2012. Target penyusunan program ini diharapkan mampu menekan 20 persen fatalitas per 100.000 penduduk dalam kurun waktu 10 tahun dan menekan 15 persen korban luka berat per 100.000 penduduk hingga tahun 2012. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi keselamatan jalan seperti *road show* ke sekolah-sekolah, pengusaha jasa transportasi, dan awak kendaraan umum. Selain itu, imbauan sadar keselamatan berlalu lintas juga telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun instansi terkait lainnya serta menyebarkan pesan melalui baliho, spanduk, dan

stiker.

7. Ancaman Berdimensi Penegakan Hukum

Dimensi penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah terkait dengan aspek substansi hukum yang meliputi belum memadainya perundang-undangan spesifik yang menyangkut perdagangan orang (khususnya terhadap anak), kepemilikan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan mengenai perdagangan orang. Selain itu, dalam aspek struktur hukum yang meliputi situasi dan kondisi organisasi penegak hukum, sumber daya manusia para penegak hukum, sarana dan prasarana, serta dana/anggaran. Demikian juga halnya dengan aspek kultur hukum, yang meliputi kondisi kultur aparat penegak hukum dan kultur masyarakat sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung kegiatan operasional aparat penegak hukum, yang menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum tidak sepenuhnya efektif, akibatnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak seharusnya lebih mengefektifkan jaminan perlindungan hukum bagi para saksi dan/atau korban perdagangan orang agar saksi dan/atau korban dapat dengan tenang memberikan kesaksian/keterangan. Aparat pemerintahan seharusnya mengamandemen peraturan perundang-undangan yang selaras dengan standar-standar internasional, sehingga dapat mengakomodir kepentingan dari pihak korban.

8. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah

Permasalan pembangunan yang dihadapi Provinsi Sulawesi

Selatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dalam menjaga kesinambungan pembangunan antara lain:

1) Bidang pendidikan: (a) masih tingginya angka buta aksara serta angka partisipasi sekolah cenderung menurun, (b) standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai, (c) belum optimalnya aksesibilitas, (d) sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan (e) penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat.
2) Bidang kesehatan: (a) terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta meningkatnya penyakit degeneratif, (b) kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang, (c) gerakan SUN (*Scaling Up Nutrition*) untuk perbaikan Gizi anak atau perbaikan Gizi 1000 hari pertama kehidupan dan (d) pembinaan Gizi Masyarakat;
3) Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: (a) belum merata-nya aksesibilitas pelayanan transportasi, (b) belum optimalnya kinerja sarana dan prasana sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan Sulawesi Selatan, (c) rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, (d) tingkat kerusakan jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi yang masih tinggi, (e) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, (f) belum semua wilayah mempunyai Rencana Dasar Tata Ruang, produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang dan (g) pelaksanaan Penataan Ruang Nasional.

4) Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman: (a) belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah dan (b) belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih besarnya kesenjangan pemenuhan akan rumah layak huni.
5) Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan pada masyarakat: (a) meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan (b) kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang, serta Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun.
6) Bidang sosial: (a) masih cukup tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), (b) tingginya konflik sosial di masyarakat dan kejadian bencana alam, (c) panti-panti sosial kurang diberdayakan dan (d) rehabilitasi dan PerlindunganSosial Anak.
7) Bidang lingkungan hidup: (a) menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan , (b) menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku, (c) kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang; dan (d) dampak pemanasan global semakin meningkat.
8) Bidang kepemudaan dan olah raga: (a) masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olah raga, (b) masih kurangnya pembinaan kepemudaan dan (c) masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
9) Bidang penanaman modal: (a) belum optimalnya pengelolaan investasi, (b) iklim investasi belum kondusif khususnya dalam

hal pelayanan perizinan dan (c) lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas.

10) Bidang UMKM: (a) pemberdayakan koperasi UMKM untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, (b) inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah dan (c) jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas.
11) Bidang kependudukan dan catatan sipil: (a) masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan dan (b) tingginya tingkat pertumbuhan penduduk.
12) Bidang ketenagakerjaan: (a) masih terbatasnya lapangan kerja, dan (b) kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar.
13) Bidang ketahanan pangan: (a) belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, (b) ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi fokus daerah dan (c) kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.
14) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: (a) Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, (b) tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, (c) anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada, (d) peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan (e) tingginya bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi dan perlakuan salah pada anak dan perempuan.
15) Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera: (a) belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi dan (b) jumlah penduduk indonesia naik dua kali lipat dalam 40 tahun terakhir, diprediksi mencapai 254,4 juta-255,8

juta jiwa tahun 2015 (BPS danlembaga demografi UI) bila pertambahan penduduk masih 1,49% (Rata-Rata dunia 1,16%).

16) Bidang perhubungan: (a) kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, (b) daya tampung infrastruktur transportasi, (c) belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi dan (d) pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terintegrasi inter, intra dan antar moda dan pengembangan wilayah yang meliputi simpul transportasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang.
17) Bidang komunikasi dan informasi: (a) belum optimalnya implementasi *e-government* dan pelayanan perijinan telekomunikasi dan (b) pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat.
18) Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian: (a) belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan, (b) SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar Operasional, (c) masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi keuangan daerah (Pembiayaan, pendapatan dan belanja daerah) dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, (d) penegakan dan pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang masih lemah, (e) perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis, (f) peningkatan SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi yang diharapkan, (g) Lemahnya infrastruktur pen-

dukung pelaksanaan birokrasi, (h) penataan kelembagaan instansi Pemerintah yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasinya, (i) penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik, (j) pengembangan dan penerapan *E-Government*, (k) kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang, (l) pengalokasian pegawai pada setiap SKPD tidak merata, (m) perangkat daerah yang cenderung terlalu gemuk (banyaknya pada setiap SKPD) dan (n) munculnya berbagai masalah pertanahan termasuk asset Pemda yang bermasalah.

19) Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa: (a) belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa, (b) ketidakberdayaan masyarakat disebabkan faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya akses informasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan, (c) belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dan desa dan (d) perlunya diantisipasi akan berakhirnya program PNPM.

20) Bidang kebudayaan: (a) masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya, (b) partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang, (c) masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak dan (d) terjadinya degradasi nilai budaya dan kerifal lokal.

21) Bidang statistik: (a) belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik dan (b) pembiayaan, sarana dan prasarana yang kurang.

22) Bidang kearsipan: (a) belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan, (b) kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah, (c) regulasi tentang kearsipan belum dilaksanakan secara maksimal dan (d) belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkap provinsi dan kab/kota.
23) Bidang perpusatakaan: (a) belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan, (b) masih rendahnya minat baca masyarakat, terutama anak sekolah, (c) pengelolaan perpustakaan yang belum profesional dan (4) bahan bacaan perpustakaan yang masih minim.
24) Bidang perencanaan pembangunan: (a) belum efektifnya perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan dan (b) masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya.

D. Isu Strategis dan Indikasi

Dari berbagai masalah yang telah dipaparkan dalam tabel di atas, maka dirangkumlah beberapa isu strategis. Dimana di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang ber-

sifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Masing-masing isu strategis dan indikasinya sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Isu strategis dan indikasi di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Isu Strategis	Penjelasan	Indikasi
1	Upaya menurunkan taraf kemiskinan	Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan harus dilakukan dengan optimal agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat Kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 9,1–6,6%, sedangkan pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 10,28%, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2015-2019 Provinsi Sulawesi Selatan harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 3,68 poin persentase atau 0,74 poin persentase pertahun.	1. Kriminalitas 2. Radikalisme 3. Terorisme 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi

2	Berkurangnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2015 berkurang sebesar 2,93 persen, dan berada setara dengan rata-rata tingkat pengangguran nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2008-2015 masih mampu diserap oleh lapangan kerja yangtersedia.	1. Kriminalitas 2. Radikalisme 3. Terorisme 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi
3	Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal	Kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2014 dibandingkan tahun 2010 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 68,9.	1. Kriminalitas 2. Radikalisme 3. Terorisme 4. Kesenjangan Pengetahuan 5. Apatisme
4	Proporsi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan	Proporsi angkatan kerja di Sulawesi Selatan dengan ijasah minimal SMA mengalami peningkatan dari 34,98 persen pada tahun 2012 menjadi 40,69 persen pada tahun 2015.	1. Kesenjangan Pengetahuan 2. Kesenjangan hak azasi manusia 3. Konflik Sosial berupa diskriminatif

5	Tingkat kesehatan masyarakat belum baik.	Tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan belum menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk.	1. Angka kematian ibu dan bayi 2. Gizi buruk
6	Infrastruktur kesehatan yang memadai	Rumah sakit, puskesmas, dan lainnya terus ditingkatkan jumlah dan pelayanannnya sehingga terjangkau untuk masyarakat sampai pelosok desa. Program prioritas pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain pembangunan RS Pratama di Kabupaten Bulukamba dan Kabupaten Wajo, serta peningkatan sarana prasarana alat RS rujukan regional di 6 RSUD.	Kualitas dan kuantitas Infrastruktur kesehatan mengalami peningkatan.
7	Kebutuhan rumah layak huni mengalami peningkatan	Kebutuhan rumah layak huni di Sulawesi Selatan sangat besar, mengingat masih banyaknya penduduk yang belum memiliki rumah yang layak ditempati, kepemilikan pemukiman yang belum tertata, serta terdapat keterbatasan lahan yang disebabkan oleh kondisi fisik wilayah Sulawesi Selatan.	1. Kesejahteraan 2. Peningkatan pendapatan 3. Tingkat produktivitas ekonomi mengalami peningkatan

8	Mental/ Karakter yang baik diikuti dengan nilai-nilai kerohanian di dalam kehidupan masyarakat.	Provinsi Sulawesi Selatan pembangunan mental dan budaya masyarakat penting dilakukan untuk mendukung pembangunan fisik dan mengatasi permasalahan sosial. Pembangunan karakter melalui pendidikan dalam masyarakat merupakan upaya meningkatkan sikap mental untuk meningkatkan nilaietis diterapkan dalamkehidupan sehari-hari.	1. Disintegrasi 2. Terorisme 3. Radikalisme 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi 5. Konflik Sosial berupa diskriminatif
9	Ketahanan pangan meng-alami pening-katan	Sumber pangan lokal di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain padi, jagung, kede-lai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian yang dominan di Sulawesi Selatan. Produksi padi dan jagung angkanya relatif stabil dan terus meningkat setiap tahunnya, namun komoditas lain produksinya belum begitu besar.	1. Peningkatan sosial dan ekonomi 2. Mengurangi Konflik Sosial berupa diskriminatif 3. Mencegah terjadinya Disintegrasi
10	Pengemba-ngan Pariwi-sata belum meningkat secara signi-fikan.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Pro-vinsi Sulawesi Selatan masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang di-milikinya. Wisatawan asing	1. Kesenjangan ekonomi 2. Disintegrasi antar daerah 3. Berkurangnya pendapatan

		maupun domestik yang berkunjung ke Sulawesi Selatan belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ketempat wisata di Sulawesi Selatan meningkat setiap tahunnya walaupun peningkatan jumlah kunjungan tersebut dianggap tidak signifikan.	daerah

Sumber: Data diolah berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, 2017.

Bab 4
Spektrum Strategis Geopolitik

A. Dimensi Strategis

Sifat konflik sesudah berakhirnya perang dingin dan perubahan transformasi sistem internasional membuat dunia secara makro nampak dalam kondisi aman. Kondisi tersebut membuat banyak negara melakukan perlindungan terhadap kepentingan keamanan nasionalnya secara menyeluruh. Dalam hal ini, kekuatan militer memainkan peranan penting sebagai instrumen politik kepentingan nasional (Plotnikov, 1996). Selanjutnya kekuatan militer tidak hanya berbicara mengenai postur militer saja, namun faktor gelar pasukan, persiapan, dan operasionalisasi yang dipengaruhi oleh kondisi strategi (Davis, *et all*, 1996). R.S Cline (dalam Bakrie, 2007) menjelaskan bahwasanya *power* sebuah negara tidak hanya dibentuk oleh kekuatan ekonomi, strategi, sasaran, dan *critical mass*, faktor militer juga turut memainkan peranannya.

Sebagai instrumen politik dalam mencapai kepentingan nasional, kekuatan militer tidak harus bersifat *superior,* namun secara strategis dapat beradaptasi dengan lingkungan internasional dan militer yang terus mengalami perubahan secara dinamis (Davis, *et all*. 1996). Kekuatan militer sebagai bagian dari postur pertahanan adalah sebuah kapasitas negara yang secara politik memengaruhi negara lain atau sistem dalam hubungan internasional (Plotnikov, 1996). Implikasi militer akan memberikan pengaruh *direct military violence* dan *inderect military violence* yang menentukan fungsi militer dalam membentuk keseimbangan kekuatan, mengatur kestabilan situasi pada level lokal dan regional, sebagai alat *political*

pressure, serta memberikan perlawan terhadap *agresor*. Oleh sebab itu, kekuatan militer dapat dilihat sebagai jaminan terhadap kemerdekaan sebuah bangsa, memberikan pilihan dalam sebuah kebijakan politik, serta berfungsi sebagai pilihan tepat untuk menangkal ancaman militer, bilamana situasi mengarah pada terjadinya konflik. Selain dari pada itu, kekuatan militer juga berfungsi untuk meningkatkan kapabilitas negara dalam mencapai tujuan-tujuan politik dan kepentingan geopolitiknya.

Kondisi nyatapengembangan postur pertahanan yang dipengaruhi oleh cara pandang doktrin pertahanan tidak hanya merefleksi bentuk kepemimpinan politisi sipil, militer, juga mencakup tata gelar kekuatan pertahanan dan pemahaman lingkungan stratgeis kepentingan nasional (Wulan, 2008). Pada kenyataannya, doktrin pertahanan TNI AD masih menganut strategi defensif aktif yang penekanannya pada usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, serta kepentingan nasional yang hanya berdasarkan pada tindakan preventif aktif dan represif. Karakter pertahanan Indonesia yang masih bersifat *inward-looking* hanya menekankan pada ancaman-ancaman yang bersifat internal bagi kedaulatan, keutuhan teritorial, serta keselamatan bangsa dan negara daripada ancaman-ancaman eksternal, seperti persaingan dengan negara Singapura dan Malaysia di Asia Tenggara dalam persepsi tipologi ancaman keamanan nasional (Widjoyanto, 2008).

Secara normatif, tidak adanya perubahan doktrin pertahanan Indonesia akan memberikan pengaruh tingkat operasional postur pertahanan. Kondisi ini akan menciptakan postur pertahanan yang tidak bisa bertahan dalam menjalankan fungsi pertahanannya sebagai alat negara dalam menghadapi ancaman eksternal dan dalam menopang peran Indonesia dalam sistem internasional. Pembangunan postur pertahanan bertujuan sebagai upaya untuk memper-

tahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pengembangan postur pertahanan yang diarahkan kepada doktrin pertahanan. Doktrin pertahanan yang dimaksud adalah sebuah negara merupakan elemen dasar dalam sebuah negara yang mengembangkan kekuatan, kemampuan, dan gelar hingga strategi pertahanan yang bertujuan untuk merefleksikan dan menghadapi perubahan atmosfer lingkungan strategi-nya. Paradigma doktrin pertahanan akan memengaruhi pengembangan postur pertahanan yang disesuaikan dan ditujukan untuk mengahadapi ancaman dan persaingan dilingkungan strategis merupakan sebuah langkah *balancing* atau strategi sebuah negara untuk mendukung kebijakan luar negeri dan menciptakan stratetegi pertahanan.

Lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari pengaruh global. Adanya manifestasi teror yang dialami oleh Negara Adikuasa Amerika Serikat pada 11 September 2001 dengan maksud untuk memporak-porandakan masyarakat juga mendapat reaksi keras di Asia Tenggara. Gejala 11 September 2001 tersebut menyadarkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bahwasanya terorisme merupakan ancaman besar bagi mereka (Luhulima, 2003). Oleh sebab itu, maka terorisme menjadi ancaman keamanan dan stabilitas regional yang jauh lebih sulit untuk ditebak, karena sifatnya yang tidak terbentuk (*amorphous*), serta tidak mengakui batas-batas negara dan kedaulatan operasinya. Dalam lingkup yang lebih luas perubahan tersebut nampak pada agenda keamanan global yang mengarahkan perhatian dunia pada ancaman terorisme bentuk baru (*new terorrism*). Perubahan tersebut juga terkait dengan Asia Tenggara sebagai kawasan yang diidentifikasi-

kan sebagai daerah yang paling tidak aman di dunia (*among world's most troubled areas*) yang disebabkan munculnya gerakan yang mengatasnamakan Islam yang banyak dikaitkan dengan jaringan Al-Qaeda. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang memengaruhi keamanan Asia Tenggara, seperti misalnya adanya kekayaan sumber laut dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan keamanan maritim yang menjadi fokus perhatian utama dari Angkatan Laut untuk mengatasi berbagai macam ancaman kedaulatan nasional yang berasal dari faktor eksternal, seperti persoalan bajak laut, penyelundupan senjata, masalah narkoba, sampai pada kasus imigran gelap. Oleh karena itu, dalam konteks keamanan regional di kawasan Asia Tenggara, sejumlah isu keamanan masih mewarnai kawasan ini, seperti konflik yang mengklaim masalah teritorial, keamanan jalur pelayaran dan perbatasan, terorisme, perompakan, bajak laut, dan penyelundupan (Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis, 2008).

Keberadaan tingkat keamanan sebagai hasil dari lingkungan strategis yang telah mengalami banyak perubahan sebagai hasil dari perubahan dinamika politik, sepertinya tidak berjalan searah dengan mengacu pembangunan postur pertahanan di Indonesia. Pada kenyataannya, ketika lingkungan strategis mengalami perubahan, pengembangan postur pertahanan Indonesia justru belum merespon perubahan tersebut, khususnya pada periode pasca kejadian 9/11. Kondisi nyata postur TNI sudah sesuai dengan target lima tahunan (tahun 2000-2005) dengan jumlah 363.191 prajurit, namun pemenuhan materiil dan alutsista belum sepenuhnya terpenuhi.

Dinamika lingkungan strategis internasional selalu membawa implikasi baik positif maupun negatif pada sisi lain secara bersamaan, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perkembangan nasional. Implikasi positif membawa manfaat dalam

mendukung cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional, sedangkan implikasi negatif menyebabkan meningkatkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara. Situasi dan kecenderungan lingkungan strategis pada awal abad 21 sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan periode satu dekade terakhir dalam abad 20.

Situasi politik internasional saat ini, selain masih diwarnai oleh berbagai permasalahan yang belum berhasil diatasi, dan semakin bertambah kompleks dengan hadirnya serangkaian masalah baru. Disamping itu, kecenderungan lingkungan strategis semakin sulit diperkirakan karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan semakin menjadi corak dominan. Di namika politik dan keamanan internasional semakin intens karena dibawah pengaruh fenomena globalisasi dan berbagai implikasinya, negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerjasama, namun pada sisi lain persaingan antarnegara dalam melindungi kepentingan nasional juga semakin meningkat. Interdependensi antarnegara semakin menguat, tetapi pada saat yang bersamaan kesenjangan *power* ekonomi dan militer semakin melebar karena agenda dan isu internasional masih dominan dipengaruhi oleh agenda dan kebijakan negara-negara maju. Akibatnya negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas, harus lebih hati-hati mengatasi permasalahan yang dihadapi, lebih aktif memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang dan lebih baik dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Untuk itu, melakukan telaahan dan prediksi kecenderungan (analisa) lingkungan strategis global dan regional, bersifat fundamental bagi proses perumusan kebijakan nasional dalam berbagai bidang.

B. Spektrum Geopolitik Global

Secara mendasar, isu maupun fenomena global yang akan terus mewarnai, memengaruhi, dan memberi dampak terhadap lingkungan strategis saat ini adalah:

1. Fluktuasi harga minyak dunia. Di tengah-tengah kondisi semakin terbatasnya cadangan minyak dunia, dihadapkan dengan semakin tingginya kebutuhan akan sumber daya strategis tersebut, kecenderungan meningkatnya harga minyak dunia tidak akan dapat dihindari. Oleh sebab itu, ke depan diharapkan adanya upaya kerjasama menstabilkan harga semakin besar, upaya mengurangi ketergantungan pada sumberdaya minyak dan gas bumi semakin meningkat, individualisme mengamankan sumber daya strategis semakin intens.
2. Perubahan Iklim. Tanda-tanda perubahan iklim akibat dampak pemanasan global telah mulai terlihat. Walaupun kesadaran internasional meningkat tetap komitmen menerima tanggung jawab masih rendah, seiring dengan masih lemahnya instrumen kerjasama dan pengawasan. Oleh sebab itu, diharapkan ke depannya upaya kerjasama untuk mengurangi laju dan memitigasi dampak pemanasan global semakin meningkat, tetapi secara bersamaan jalannya pembangunan negara berkembang menjadi terbatas.
3. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang dialami negara-negara maju membawa dampak yang tidak dapat dihindari bagi negara-negara berkembang. Interkoneksi perekonomian internasional menyebabkan krisis ekonomi semakin rawan terjadi. Oleh sebab itu, maka diharapkan dapat menguatnya transparansi dan pengawasan ekonomi dan keuangan internasional pada saat yang bersamaan.

4. Dominasi negara-negara maju. Perkembangan dunia masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara *major powers* dalam mengamankan kepentingan nasional masing-masing kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh sebab itu, maka diharapkan dinamika politik dan keamanan internasional, masih bergantung pada keseriusan negara-negara besar dalam memelihara perdamaian dan stabilitas internasional, dan mengurangi *adventurisme* politik luar negeri yang mendorong instabilitas dan gejolak di berbagai kawasan. Upaya reformasi dan restrukturisasi PBB semakin intens karena merupakan kepentingan mendesak dalam menjamin keadilan dan kepentingan negara-negara tersebut yang berkembang, tetapi akan banyak bergantung pada kesediaan dan komitmen negara-negara besar dalam mengurangi kekuasaannya dalam organisasi internasional. Meningkatnya upaya peningkatan kekuatan militer oleh seluruh negara di dunia dalam rangka menjamin kelangsungan hidup denganmemperkuat kemampuan daya tangkal menghadapi ancaman tradisional dan nontradisional.
5. Perubahan kekuatan dunia. Siklus petakekuatan dunia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan melemahnya kedigdayaan ekonomi AS, meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Cina dan India, serta menguatnya *leverage* Rusia, perimbangan konstelasi global tengah terjadi. Oleh sebab itu, maka diharapkan persaingan mempertahankan pengaruh global dan regional semakin mengemuka antara negara-negara besar, sehingga adaptasi terhadap pergeseran kutub interaksi internasional semakin penting, terutama bagi negara-negara berkembang.

C. Spektrum Geopolitik Regional

1. Kawasan Amerika. Dukungan publik AS terhadap kebijakan pemerintah Bush di Irak semakin menurun yang terefleksikan dari besarnya atensi publik AS terhadap calon-calon kandidat Presiden dari Partai Demokrat. Dari kecenderungan publik tersebut, calon kandidat dari Partai Demokrat berkesempatan memenangkan kursi Presiden AS tahun 2008, khususnya Barack Obama Demokrat (Senator Illinois) dan Hillary Clinton (Senator New York). Dalam Pemilu 2008, AS akan memiliki Presiden baru. Kemungkinan pergantian partai penguasa dari Partai Republik ke Partai Demokrat tidak berarti adanya perubahan fundamental dalam kebijakan luar negeri AS, karena nilai-nilai dan landasan kebijakan AS tidak berubah yakni terpusat pada Demokrasi dan HAM. Namun demikian, potensi kebijakan luar negeri AS yang lebih moderat, mengedepankan multilateralisme dan memfokuskan pada pembangunan kerja sama antarnegara yang lebih erat terbuka lebar, termasuk terhadap Indonesia. Seiring dengan menurunnya kedigdayaan AS, pengaruh negara tersebut di kawasan Amerika Latin mendapat tantangan dari perkembangan menguatnya kebangkitan sosialisme diantara negara-negara Amerika Latin yang menempatkan diri sebagai sebagai kekuatan yang anti-sistem pasar dan anti-kapitalisme.
2. Kawasan Eropa. Tahun 2007 menandai peningkatan peran dan pengaruh Rusia dalam dinamika ekonomi, politik dan keamanan di kawasan. Meningkatnya penjualan energi gas bumi yang sejalan dengan tingginya angka penjualan senjata kepada berbagai negara, telah mendorong membaiknya kinerja ekonomi Rusia. Ditambah dengan stabilitas Eropa terhadap peran politik dan pengaruh Rusia meningkat signifikan. Keter-

gantungan negara-negara Eropa terhadap pasokan gas Rusia telah memberi negara tersebut *leverage* politik dalam menjamin kepentingan nasionalnya. Meningkatnya dorongan *adventurisme* Rusia terlihat dari tindakan penghentian pasokan gas ke negara Ukraina yang kemudian memberikan pengaruh ke negara-negara Eropa, penarikan diri dari pasukan Perjanjian Pasukan Konvensional di Eropa (*Treaty of Conventional Force in Europe/CFE*) menyusul program penggelaran pertahanan rudal di kawasan Eropa (Polandia dan Ceko), dan upaya peningkatan menjadi *Shanghai Cooperations Organization* (SCO) sebagai kekuatan pesaing AS dan negara-negara sekutunya. Dengan kecenderungan, maka peran internasional tampaknya Rusia akan meningkat, dan negara tersebut akan lebih berani mengambil tindakan-tindakan dalam rangka menjamin kepentingan nasionalnya. Dalam konteks internasional, peta kekuatan dunia akan mengalami perubahan dan Rusia dapat menjadi kutub baru kekuatan dunia.

Provinsi Kosovo untuk memisahkan diri dari Serbia, merupakan isu sensitif yang kini berkembang di kawasan Eropa. Hal ini negara-negara sekitar antara negara-negara karena terdapat kekhawatiran kesalahan penanganan masalah Kosovo akan menyebabkan negara tersebut kembali mengalami konflik, dan berpengaruh pada negara-negara sekitar. Perbedaan sikap pemegang hak veto untuk sementara menyebabkan masalah ini sedikit tertahan, akan tetapi benturan kepentingan menjadi semakin sulit terhindari, khususnya Rusia yang menentang keras rencana ini. Pemberian dukungan kemerdekaan dapat menjadi suatu preseden internasional. Untuk itu, penting mengamati latar belakang Uni Eropa sebagai salah satu kekuatan global terhadap isu ini. Campur tangan internasional terhadap masalah

domestik Serbia, dapat meluas pada negara-negara lain dan menjadi suatu presenden internasional yang berdampak terhadap negara-negara yang menghadapi masalah separatisme, seperti Rusia, Thailand, Filipina, dan Indonesia.

3. Kawasan Afrika. Penanganan konflik di Sudan, baik konflik Utara-Selatan dan konflik Darfur, memasuki tahap krusial pada tahun 2007 dengan dimulainya rangkaian perundingan perdamaian antara pihak pasukan UA Afrika dalam rangka pemeliharaan perdamaian. Namun demikian, masih mengemuka sejumlah kendala yang bila tidak diatasi dengan baik akan berakibat pada munculnya hambatan ataupun kegagalan tercapainya perdamaian yang diupayakan UA dan PBB. Perkembangan politik dan keamanan di kawasan Afrika pada tahun 2008, masih akan banyak diwarnai dengan masalah demokrasi dan HAM, khususnya dalam proses pergantian rezim kepemimpinan. Kecenderungan hadirnya kekerasan dalam politik di Afrika masih cukup kuat, sehingga rawan terjadi gejolak-gejolak yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban sipil yang cukup banyak.
4. Kawasan Asia

a) Asia Timur

Perkembangan konflik Cina-Taiwan pada tahun 2007 tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. AS tetap berada di belakang Taiwan, dalam arti akan terus memenuhi kepentingan Taiwan untuk membangun kekuatan militernya. Namun demikian, AS tetap mendukung *status quo* saat ini, dimana Taiwan dan Cina tidak terlibat dalam peperangan.

Tetapi perkembangan menghangat kembali dengan adanya kasus mendaratnya pesawat Presiden Taiwan di Alaska dan adanya rencana referendum di Taiwan. Pelaksanaan referendum akan menyebabkan situasi keamanan internasional berada da-

lam ketegangan yang berkepanjangan. Jepang telah mengambil langkah-langkah modernisasi pertahanan dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi keamanan di Asia Timur, khususnya terkait pembangunan kekuatan militer Cina, nuklir Korea Utara dan ancaman terorisme. Selain mengubah status *Japan Defense Agency* menjadi departemen. Jepang melakukan penyederhanaan struktur kekuatan pertahanan menjadi *a multi-functional, flexible and effective force* yang siap menghadapi ancaman senjata nuklir, kimia dan biologi. Jepang juga meningkatkan anggaran pertahanan yang secara tegas dinyatakan oleh Departemen Pertahanan Jepang sebagai upaya mengimbangi modernisasi persenjataan Cina dan Korea Selatan. Dalam kecenderungan potensi terganggunya *status quo* dalam konflik Cina-Taiwan dan meningkatkan perlombaan senjata di kawasan Asia Timur, respons Cina akan menentukan dinamika politik dan keamanan regional ke depan.

b) Asia Selatan

Pengaruh India di kawasan Asia Selatan meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan keberhasilan pembangunan militer negara tersebut dalam 5 tahun terakhir. Pengaruh India memungkinkan negara tersebut berupaya meningkatkan posisi tawar khususnya terhadap Pakistan dan Cina. Disisi lain, kondisi Pakistan tetap diwarnai oleh gejolak politik dan keamanan yang menyebabkan pemerintah Pakistan lebih banyak memfokuskan pada masalah dalam negeri, dibandingkan mengkhawatirkan masalah India. Menguatnya India sebagai kekuatan regional menyebabkan arah kebijakan India pada masa mendatang dicermati, terutama berkaitan dengan kedekatannya dan posisi yang bersaingan dengan Cina.

c) Asia Barat

Perkembangan politik dan keamanan di Irak belum juga memperlihatkan kemajuan. Aksi-aksi kekerasan yang kini berdimensi perang saudara semakin menguat. Kehadiran AS dengan proyek demokrasinya, dianggap tidak banyak kemajuan membawa bagi penduduk Irak, bahkan sebaliknya menjadi pemicu kekerasan antar sekte, Syiah, dan kelompoknnya. Konferensi Annapolis membawa harapan besar terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina. Hasil dari konferensi ini cukup menggembirakan kedua pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan untuk memulai kembali perundingan damai yang telah lama terhenti, sebelum akhir tahun 2008. Namun demikian, kalangan garis keras di Palestina maupun Israel kemungkinan akan menghambat tercapainya kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

Presiden Ahmadinejad secara konsisten menyatakan bahwa Iran mendapat sanksi dari DK PBB ataupun ancaman lain dari negara-negara Barat. Laporan 16 badan intelijen Amerika Serikat dalam *National Intelligence Estimate* menjadi modal untuk digunakan untuk menyerang kebijakan Presiden Bush. Dalam kondisi ketiadaan kepastian jaminan pasokan dari Barat, Iran tampaknya akan tetap berupaya mencapai keinginannya dalam rangka meningkatkan rasa keamanan dan *leverage* di tengah-tengah tekanan negara-negara Barat.

d) Asia Tenggara

Kontroversi perjanjian ekstradisi dan pertahanan Indonesia-Singapura kerjasama berdampak pada terganggunya hubungan masih berlangsung. Permasalahan ini telah berdampak pada terganggunya hubungan Indonesia-Singapura. Percobaan dikudeta kembali terjadi Filipina pada tahun 2007.

Namun penanganan cepat, tegasdan sigap menyebabkan upaya inskonstitusional tersebut mengalami kegagalan. Perkembangan demokrasi di Thailand disepakatinya konstitusi baru. Akan tetapi, kelangsungan menunjukkan kemajuan dengan demokrasi di Thailand masih rawan terhadap perebutan kekuasaan antara sipil dan militer. Isu demokratisasi dan peristiwa kekerasan berdarah di Myanmar telah menyebabkan negara tersebut dan negara-negara ASEAN menjadi pusat perhatian kalangan masyarakat internasional.

Tekanan terhadap junta militer Myanmar untuk melanjutkan arus demokratisasi semakit menguat. Kerusuhan Malaysia pada tahun 2007 akibat menguatnya tuntutan dari kaum minoritas keturunan Cina dan India atas diskriminasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia sempat menggoyahkan stabilitas politik negara tersebut. Bagi Malaysia, bila tidak tertangani, maka perkembangan ini akan mengarah pada reformasi di negara tersebut. Dalam konteks stabilitas keamanan regional, sejumlah isu keamanan bersumber pada klaim teritorial, keamanan jalur pelayaran dan perdagangan, terorisme, dan masih mewarnai kawasan ini, seperti konflik yang perompakan, bajak laut dan penyelundupan. Pembangunan kepercayaan dan peningkatan kerjasama di kawasan dalam mengatasi masalah-masalah ini terus dilaksanakan. Namun demikian, permasalahan ini menyebabkan setiap negara berupaya melakukan kekuatan militer untuk mencegah ancaman dan membangun daya tangkal.

5. Kawasan Australia. Secara umum perkembangan Australia pada tahun 2007 adalah langkah peningkatan kemampuan militer dan ekonomi yang cukup berarti. Namun demikian, per-gantian kepemimpinan di negara tersebut menjadi isu penting yang

menjadi faktor krusial bagi interaksi Australia dalam permasalahan global dan regional. Kemenangan Partai Buruh Australia, di bawah kepemimpinan Kevin Ruud, telah menimbulkan harapan baru bagi hubungan baik Indonesia dengan Australia.

Adanya perubahan kepemimpinan, tidak serta merta berarti Australia akan melepaskan semua pengaruh besar AS. Pada prinsipnya, bentuk dan kecenderungan hubungan Indonesia dan Australia pada masa mendatang akan dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan memperbaiki kualitas hubungan kedua negara pada masa pemerintahan Australia yang baru ini. Berarti Australia akan melepaskan semua pengaruh besar AS. Pada prinsipnya, bentuk dan kecenderungan hubungan Indonesia dan Australia pada masa mendatang akan dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan memperbaiki kualitas hubungan kedua negara pada masa pemerintahan Australia yang baru ini.

D. Spektrum Geopolitik Nasional

1. Ideologi. Penurunan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan bahaya laten ideologi oleh kelompok kiri, seperti dengan memutar balikkan fakta-fakta peristiwa G30S/PKI, membentuk partai politik, seperti Partai Persatuan Nasional (Papernas), ataupun menyusup menjadi anggota Partai Politik lainnya untuk menjadi anggota DPR maupun DPRD. Hal ini dimungkinkan Konstitusi mencabut pasal Pemilu No. 12 tentang Eks Tapol/ Napol PKI dapat menjadi calon legislatif dalam pemilu. Hal ini tentunya akan memberikan keleluasaan lebih luas untuk memengaruhi sikap politik parlemen dalam upayanya merealisasikan tujuan politiknya. Penurunan kesadaran tentang Pancasila juga terlihat dari digulirnya wacana penerapan Syariat Islam

dan sistem pemerintahan Islam di Indonesia. Hal ini paling tidak dapat dilihat dengan adanya kegiatan kelompok ini yang cukup menonjol, seperti adanya wacana calon presiden independen, penyelenggaraan konferensi Khilafah Internasional yang dilakukan oleh Hisbuth Tahrir Indonesia (HTI). Perkembangan ini perlu terus dicermati, sehingga tidak berkembang luas yang pada akhirnya memengaruhi sendi-sendi kehidupan nasional.

2. Politik. Dinamika perkembangan politik lokal nasional berjalan sangat kondusif yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akanhak-hak politiknya cenderung semakin meningkat. Namun demikian, dalam perkembangan lain, tuntutan pemekaran daerah, konflik antar kelompok dalam Pilkada, konflik antar daerah dalam memperebutkan wilayah yang kerapkali berujung pada aksi-kasi kekerasan masih mewanai dinamika politik lokal. Aktivitas partai-partai politik, baik partai baru maupun lama menghadapi Pemilu 2009 mulai menghangat. Mendekatnya Pemilu, banyak partai-partai walaupun semuanya belum RUU Politik. Selain melakukan konsolidasi internal partai, perkembangan menarik dari hubungan antar partai ini adalah munculnya pertemuan-pertemuan antar partai, baik partai besar maupun partai-partai menengah dan kecil. Sementara di tingkat daerah, hubungan antar partai ditandai dengan adanya koalisi antar partai dalam Pilkada. Dilihat dari segi komunikasi politik, adanya pertemuan dan koalisi antar partai cukup positif, karena akan dapat saling memberikan pemahaman.
3. Ekonomi Sosial dan Budaya. Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun dalam meningkatkan kinerja perekonomian,

berbagai kendala-kendala yang masih dihadapi oleh pemerintah baik menyangkut kompetitifnya produk, rumitnya birokrasi, jaminan hukum dan keamanan hingga faktor-faktor eksternal lainnya, seperti fluktuasi nilai tukar uang dan harga minyak dunia. Produk Indonesia masih menghadapi kendala di pasar internasional, dimana, produk-produk pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam Indonesia seringkali dihadapkan pada hambatan yang berkenaan dengan tarif hingga tuduhan dumping.

Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kinerja perekonomian negara masih mengemuka, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan tingginya harga minyakdunia yang diperkirakan dapat mencapai 100 dolar AS per barrel. Jika hal ini tidak dapat diatasi, maka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah membutuhkan terobosan baru untuk dapat membawa kemajuan signifikan.

Secara umum kondisi perkembangan sosial budaya di masyarakat terus membaik, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aksi unjuk rasa masyarakat cenderung terus menurun. Meskipun demikian masih tingginya angka pengangguran, permasalahan buruhyang memicu terjadinya aksi unjuk rasa dana danya konflik antar masyarakat, baik disebabkan karena perbedaan prinsip keagamaan maupun permasalahan lain yang memicu terjadinya tindak kekerasan, seperti masalah tanah dan SARA, masih menjadi permasalahan yang perlu terus diupayakan penyelesaiannya.

4. Penegakan Hukum. Situasi keamanan dalam negeri tampak terus semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan penanganan terorisme dan semakin kondusifnya daerah-daerah yang selama ini rentan terhadap berbagai gejolak konflik. Kemajuan yang menonjol adalah penangkapan Abu Dujana dan

tokoh-tokoh pelaku teror lainnya di sejumlah kota. Disamping itu masih adanya gejala radikalisme di tanah air, mengindikasikan masih besarnya potensi ancaman terorisme. Dalam penyelesaian permasalahan perbatasan dengan negara-negara tetangga relatif belum mengalami kemajuan berarti. Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia masih diwarnai oleh sejumlah masalah yang belum tertangani, seperti di perbatasan darat RI-Malaysia.

Aktivitas kegiatan transnasional, seperti penyelundupan barang dan senjata, *drugs and human trafficking*, *illegal logging*, *illegalfishing* juga masih cukup menonjol. Walaupun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai cara, termasuk dengan menggelar operasi keamanan, tetapi aktivitas illegal tersebut masih cukup tinggi. Bencana alam tetap sering terjadi sepanjang tahun 2007. Penanganan parakorban dan pembangunan kembali sejumlah wilayah yang terkena bencana alam merupakan prioritas pemerintah, termasuk dengan memperbaiki manajemen penanganan bencana di tanah air.

Pada aspek ancaman yang meliputi perkembangan secara internasional, regional, dan nasional termasuk dalam lingkup lokal, maka dapat diidentifikasi dan dianalisis beberapa indikasi ancaman dari masing-masing perkembangan tersebut baik secara internasional, regional dan nasional yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Ancaman berdasarkan perkembangan internasional, regional dan nasional

No	Wilayah Perkembangan	Ancaman	Aspek Ancaman
1	Internasional	Proxy war	Teknologi dan Keselematan Umum
		Ketidakpastian Nilai Tukar	Ekonomi
		Krisis Ekonomi	Ekonomi
		Krisis Pangan	Keselamatan Umum
		Cyber Terorisme	Teknologi
		Radikalisme	Ideologi
		Terorisme	Keselamatan Umum
2	Regional	Ilegal Fishing	Ekonomi
		Ancaman Perbatasan	Politik
		Penetrasi Asing di Wilayah Kedaulatan dan Pemilihan Kepala Daerah	Politik
3	Nasional	Separatisme	Politik
		Radikalisme	Ideologi
		Terorisme	Keselamatan Umum
		Konflik Sosial	Keselamatan Umum

No	Wilayah Perkembangan	Ancaman	Aspek Ancaman
		Pornografi dan Putus sekolah	Sosial Budaya
		Kelangkaan Air Bersih	Ekonomi
		Kesenjangan Penduduk Kaya, Miskin dan pengangguran	Ekonomi
		Human Trafficking, *Illegal Fishing*, dan Penyelun-dupan Barang	Hukum

Sumber: Diolah berdasarkan data primer dan sekunder, 2017

Bab 5
Penutup

A. Kesimpulan

Pembahasan ini dijelaskan beberapa sub bab inti dari seluruh kajian ini yang merupakan jawaban dari rumusan penelitian dan juga tujuan penelitian. Subbab pertama dalam bab ini perihal optimalisasi sinergitas atau regulasi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, penjelasan dalam sub bab ini adalah terkait dengan relevansi berbagai kebijakan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan filosofis pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah, meliputi globalisasi dan kemajuan informasi dan teknologi, peran perguruan tinggi dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan Nasional dan juga sebagai simpul akselerasi kesejahteraan.

Subbab selanjutnya adalah penjelasan mengenai optimalisasi strategi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Pada bagian sub bab ini merupakan penjelasan yang berisi tentang koneksivitas transportasi laut dengan pembangunan poros maritim. Kondisi tersebut menjadi pokok utama dalam melakukan percepatan pembangunan di daerah khususnya untuk mendukung sarana dan prasarana transportasi laut. Di samping itu juga dapat mencegah maraknya praktik *illegal fishing,* masuknya peredaran barang-barang selundupan, obat-obat terlarang

dan zat aditif lainnya, senjata illegal, dan lain sebagainya yang berdampak terhadap sistem keamanan nasional.

Subbab selanjutnya adalah terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam pembahasan bab ini diuraikan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan daerah adalah ancaman Nonmiliter yang meliputi ancaman berdimensi ideologi, berdimensi politik, berdimensi sosial dan budaya, berdimensi teknologi informasi, berdimensi keselamatan umum, dan berdimensi penegakan hukum. Uraian ini dimaksudkan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya melakukan introspeksi terhadap berbagai faktor pendukung dan penghambat pembangunan daerah.

1. Ancaman berdimensi ideologi. Ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan (liberalisme) sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Upaya dalam menghadapi atau menangkal ancaman ini adalah dengan kebijakan serta langkah-langkah politik yang tepat serta intensif dalam mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila, serta konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara.

   Provinsi Sulawesi Selatan merupakan simpul pertumbuhan di Wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, dimensi ideologi yang terjadi pada setiap kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berdampak negatif. Hal ini disebabkan pola pendidikan yang terjadi di setiap kabupaten/kota cenderung mengarah ke pendidikan formal dan diikuti pendidikan informal yang umumnya masyarakat menjadikannya sebagai alat kontrol untuk terhindar dari ideologi

yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi tersebut juga diikuti melalui peran perguruan tinggi dalam menjaga keutuhan ideologi dalam kehidupan berbangsa, sebagaimana yang dikatakan oleh akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H., melalui paparannya didepan tamu dan peserta Seminar Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Daerah di lingkungan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan ideologi Bangsa Indonesa. Selanjutnya Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dasar konstitutional. Selain dari pada itu, peran Perguruan Tinggi saat ini juga membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan melalui kurikulum dan mata kuliah di masing-masing Perguruan Tinggi. Selanjutnya melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tetap memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai agama, humaniora dan persatuan bangsa.

2. Ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti contohnya Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang berdimensi politik, pertahanan nonmiliter di dalam

bidang politik menjadi unsur serta kekuatan utama yang dibantu oleh unsur nonmiliter yang lainnya, termasuk kekuatan dari unsur pertahanan militer.

Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mengedepankan azas akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi ini seringkali didapati melalui perolehn prestasi yang diraih setiap kabupaten/kota melalui program Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sistem politik di Provinsi Sulawesi Selatan juga berjalan demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, dengan melakukan pemilihan Kepala Daerah secara demokratis. Calon kepala daerah yang ingin maju dalam pertarungan politik seringkali dianggap cakap dan mumpuni untuk maju sebagai kontestan kepala daerah. Pada tahun 2018 mendatang Provinsi Sulawesi Selatan akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diharapkan oleh masyarakat pemilihan ini berjalan dengan kondusif. Selanjutnya pada tahun 2019 mendatang juga akan dilaksanakan pemilihan calon anggota legislatif baik ditingkat kabupaten/kota hingga tingkatan provinsi. Oleh sebab itu, peran dari Kementerian Lembaga juga sangat diharapkan dalam rangka memantau jalannya proses demokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Ancaman berdimensi ekonomi. Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi yang terjadi melalui pembagian kuadran I, II, III, dan IV, meupakan adanya faktor keterbatasan dan hambatan yang disebabkan masih terdapatnya daerah pedalaman dan wilayah pesisir disebabkan akses sarana transportasi darat yang terbatas, sehingga sulit untuk menjangkau. Disamping itu pula, rendahnya faktor sosial ekonomi yang disebabkan rendahnya sumber daya manusia, penduduk masih bergantung kepada lapangan

pekerjaan disektor formal (pegawai negeri sipil), sehingga cenderung mengabaikan lapangan pekerjaan disektor non-formal. Faktor urbanisasi yang tidak terkendali juga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan penduduk yang berada di pinggiran kota, lahan pertanian mereka tergusur yang disebabkan pembangunan perkotaan merambah ke wilayah pinggiran kota (*hinterland*). Pemerintah diharapkan serius dalam rangka menyusun strategi untuk memetakan wilayah yang dianggap sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, guna memberikan solusi melalui kebijakan pembangunan disetiap kabupaten/kota untuk mengatasi kesenjangan sosial.

4. Ancaman berdimensi sosial budaya. Pada dimensi sosial budaya di Provnisi Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan kondusif yang ditampilkan rendahnya angka perselisihan yang disebabkan oleh faktor perbedaan pemahaman terhadap sosial budaya. Diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Selatan juga salah satu provinsi yang menjunjung tinggi toleransi antar kelompok dan budaya yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini saran dari akademisi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H., yakni keikutsertaan perguruan tinggi melalui keterlibatan mahasiswa. Kegiatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Daerah khususnya pada lingkungan Pendidikan, adalah sangat penting dilakukan. Kegiatan ini adalah usaha sosialisasi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan yang dulu dikenal pertanahan dan keamanan territorial di bawah komando territorial. Perguruan tinggi, sebagai lembaga akademik yang membina dan mendidik SDM masa depan, perlu diberi pemahaman pentingnya pemberdayaan pertahanan di wilayah. Mahasiswa adalah potensi

bangsa yang akan mengelola dan mengurus negara di masa akan datang, harus diberikan wawasan kebangsaan agar memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan tekad untuk menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan ini, harus diapresiasi dan disambut baik, karena ini adalah bagian membangun masa depan bangsa dari sektor pertahanan dan keamanan.

Peran perguruan tinggi di provinsi dalam pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan pilar utama pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Konsep dasarnya adalah melalui semangat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, maka diharapkan generasi muda juga ikut andil dan melibatkan diri sebagai generasi penerus dalam pembangunan di masa mendatang. Pemberdayaan wilayah pertahanan dibangun melalui basis wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini dimaksudkan agar generasi muda menanamkan semangat patriotisme dengan landasan Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Bhineka Tunggal Ika. Selanjutnya, peran dari Pendidikan Tinggi dengan semboyan Tri Dharma yang meliputi aspek; pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, senantiasa mendorong dan membantu pemerintah daerah dan pusat untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar Kebangsaan Indonesia. Kondisi tersebut didukung oleh pemberian pengajaran melalui mata kuliah diantaranya; Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, Bahasa Indonesia, Budaya Maritim/Pola Ilmiah Pokok (PIP), serta berbagai mata kuliah pendukung lintas fakultas lainnya.

69

5. Ancaman berdimensi teknologi informasi. Kota Makassar merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengaplikasikan program *smart city* atau dikenal sebagai kota

cerdas. *Smart City* sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Namun demikian ada yang berbeda dari pengaplikasian program *smart city* di Kota Makassar, karena dipadukan dengan budaya lokal warga Makassar yang dikenal dengan istilah *sombere'* (bahasa makassar dikenal ramah, sopan, dan santun). Dampak positif yang diperoleh dipadukan akan menciptakan nilai-nilai kearifan lokal yang bisa mensinergikan pikiran masyarakat dengan sistem informasi dan pelayanan yang berbasis digital oleh pemerintah. Di dalam program ini, para pelajar tidak perlu lagi membawa uang ke sekolah, cukup menggunakan *Smart Card Student* para pelajar bisa jajan di kantin sekolah. Dalam penggunaa transaksinya para orangtua akan mendaftar sebagai anggota *Smart Card Student* melalui pihak sekolah, nantinya pihak sekolah akan melaporkan aktivitas atau belanja anaknya di sekolah. Aplikasi program *smart city* di Kota Makassar ini mendapat apresiasi dari Kementerian Informasi dan Komunikasi.

6. Ancaman berdimensi keselamatan umum

a) Dimensi keselamatan umum juga patut memiliki perhatian khusus upaya percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimensi keselamatan umum bidang aksesibilitas transportasi darat pengembangan jalan kolektor primer penghubung Masambake perbatasan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat agar tersambung dengan jalan kolektor primer ke Pelabuhan Belang belang yang akan meningkatkan aksesibilitas transportasi darat Kawasan Andalan Palopo dan sekitarnya ke

ALKI-II di Selat Makassar; Pengembangan jalan kolektor dari Makale ke perbatasan Kabupaten Mamasa agar tersambung dengan Bandara Tampapadang dan Pelabuhan Belangbelang di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, agar pariwisata budaya dan alam Tana Toraja dan Mamasa yang mempunyai persamaan karakter dapat lebih berkembang secara sinergis.

Transportasi laut Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran sistem transportasi laut meliputi pelabuhan regional/pengumpan primer berada pada; Waruwaru dan Malili (Kabupaten Luwu Timur), Belopa (Kabupaten Luwu), Pattirobajo (Kabupaten Bone), Awerange (Kabupaten Barru), Galesong (Kabupaten Takalar), Jeneponto (Kabupaten Jeneponto), Benteng dan Jampea (Kabupaten Kepulauan Selayar) Bantaeng (Kabupaten Bantaeng). Sementara untuk alur pelayaran kabupaten, meliputi Lepee (Kabupaten Bulukumba) dan Bantaeng (Kabupaten Kepulauan Selayar).

Sistem jaringan transportasi udara provinsi Sulawesi Selatan meliputi kebandarudaraan dan jalur penerbangan. Sistem tatanan kebandarudaraan, berupa Bandar udara bukan pusat penyebaran meliputi: Sorowako dan Malili di Kabupaten Luwu Timur, Pongtiku di Kabupaten Tana Toraja, H. Aroepala Kabupaten Kepulauan Selayar, Seko, Rampi dan Andi Jemma di Kabupaten Luwu Utara, Lagaligo-Bua Kabupaten Luwu, Bone Kabupaten Bone, Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Rute penerbangan di provinsi berupa jalur penerbangan regional meliputi: Sorowako-Makassar, Seko-Makassar, Pongtiku-Makassar, Pongtiku-Mamuju, Aroepala-Makassar, Seko-Mamuju, Seko-Palu, Rampi-Makassar, Rampi-Mamuju, Rampi-Palu, Andi Jemma-Makassar, Lagaligo-Makassar, Bone-Makassar, Bulukumba-Makassar.

b) Selanjutnya untuk kawasan banjir di Provinsi Selatan berada pada; (1) Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke dan Batang di Kabupaten Jeneponto; (2) Wilayah Maros Baru, Marusu, dan Bantimurung di Kabupaten Maros; (3) Wilayah Labakkang dan Bungoro di Kabupaten Pangkep; (4) Wilayah Bissapu dan Kota Bantaeng diKabupaten Bantaeng; (5) Wilayah Gangking, Ujung Bulu, Ujung Loe di Kabupaten Bulukumba; (6) Wilayah Sinjai Timur dan Sinjai Utara di Kabupaten Sinjai; (7) Wilayah Kajuara, Cina dan Sibulue di Kabupaten Bone; (8) Wilayah Duampanua di Kabupaten Pinrang; (9) Wilayah Baebunta dan Malangke Barat di Kabupaten Luwu; dan (10) Wilayah Wotu dan Angkona di Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, kawasan Rawan Gerakan Tanahatau Longsor Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada; (1) Wilayah Kelara dan Rumbia di Kabupaten Jeneponto; (2) Wilayah Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa di Kabupaten Bantaeng; (3) Wilayah Rindang, Rialau Ale dan Bulukumpa di Kabupaten Bulukumba; (4) Wilayah Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu Limpoe, Sinjai Tengah dan Bulupoddo di Kabupaten Sinjai; (5) Wilayah Buntucani, Kajuara di Kabupaten Bone; dan (6) Wilayah Mangkutana dan Wosuponda di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu juga terdapat kawasan yang memiliki Potensi Tsunami yang terdapat di sekitar pantai wilayah Kabupaten Pinrang, Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

c) Bidang penyelundupan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi untuk masuknya penyelundup berada di pelabuhan Kota Pare-pare. Jenis barang yang seringkali diselundupkan adalah Narkoba. Pelabuhan di Kota Pare-pare ini diyakini memiliki titik rawan untuk dapat diakses oleh para pelaku untuk mela-

kukan aksinya yang disebabkan rendahnya pengawasan dan minimnya personel pengamanan yang ditempatkan di lokasi pelabuhan. Jumlah personel pengamanan tidak sebanding dengan luasan wilayah kerja di pelabuhan Kota Pare-pare, sehingga memudahkan para pelaku untuk melancarkan aksinya dengan memanfaatkan setiap kelemahan yang ada dilokasi kejadian. Selain penyeludupan barang jenis narkoba juga rentan dengan aksi penyelundupan barang-barang elektronik yang dinilai berasal dari pasar luar negeri. Maraknya aksi penyelundupan barang elektronik ini dinilai karena masyarakat cenderung berminat membeli barang dengan harga yang relatif murah dan di bawah standar harga yang berlaku, sehingga kontribusi pasar barang ini jelas. Disamping itu barang elektronik yang didatangkan dari luar negeri ini diyakini juga lebih disenangi oleh masyarakat daripada produk dalam negeri. Selain dari pada itu, dampak negatif yang diakibatkan adalah berpengaruhnya pada stabilitas ekonomi regional hingga nasional dengan maraknya aksi penyelundupan barang illegal.

d) Narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pangsa pasar yang segar bagi para bandar dan pengedar obat terlarang narkoba. Dalam catatan kepolisian bahwa Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat 10 besar dan terbanyak penyalahgunaan narkobanya di Indonesia. Kondisi tersebut berada pada kategori darurat. Bilamana kondisi tersebut tidak ditangani secara serius, maka berdampak kepada rusaknya masa depan genarasi muda, terjadinya disparitas ekonomi yang memerlukan biaya yang tinggi dalam pengobatannya, dan merusak tubuh serta Selsel jaringan saraf bagi para pemakai narkoba.

Dari aspek keamanan bagi pengkonsumsi narkoba cenderung untuk melakukan aksi-aksi nekad meskipun bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap peredaran narkoba yang kondisinya membahayakan, bahwa dari penjelasan Kepala BNN bahwa, pangsa pasar Narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pasar yang menjadi rebutan, sehingga langkah BNN dan jajaran Polda Sulawesi Selatan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas personilnya di setiap lokasi yang dianggap sebagai titik peredaran narkoba. Oleh sebab itu, saran dari Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan agar menambah jumlah personel untuk menutup peredaran narkoba melalui aksi penyelundupan yang dilakukan melalui jaringan transportasi laut, sinergitas diantara instansi BNN, TNI, dan Polri serta Instansi lain yang memiliki wewenang untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba, dan dibutuhkan peran serta warga masyarakat guna memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap lokasi penyelundupan dan peredaran narkoba agar dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

e) *Human trafficking* di Provinsi Sulawesi Selatan masih marak terjadi. Kasus perdagangan anak dan perempuan asal Sulawesi Selatan masih kerap terjadi. Para korban itu di antaranya berasal dari Kabupaten Bone, Pinrang, Palopo, Sinjai, Tana Toraja, Soppeng, Wajo, Enrekang, Bulukumba, Gowa dan Sidrap. Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Parepare menjadi pintu utama perdagangan orang (*human trafficking*) di Provinsi Sulawesi Selatan. Modus para pelaku *human trafficking* itu di antaranya menawarkan pekerjaan menarik dengan upah yang menggiurkan kepada para calo korbannya. Dengan berbagai *modus operandi* yang ditawarkan pelaku kepada korban, di-

antaranya mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang lebih layak dibanding di daerah asal mereka sebelumnya bekerja hingga dijanjikan untuk di carikan jodoh. Kondisi lain yang terpaksa korban lakukan dan ikuti disebabkan faktor ekonomi, terlilit hutang, sumber daya yang rendah, hingga sempitnya lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, pencegahan yang dilakukan disamping keterlibatan pihak aparat yang berwajib, juga sangat diharapkan dari keterlibatan warga masyarakat dalam memberikan informasi terkait oknum-oknum yang dianggap mencurigakan.

f) Ancaman berdimensi penegakan hukum. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif baik itu mereka yang melakukan maupun tidak melakukan pelanggaran dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum juga harus menempatkan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Indonesia sebagai Negara Hukum dapat ditemukan dalam Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (*machtsstaat*). Hal tersebut, kembali dipertegas pada amandemen UUD NKRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara

Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, maka negara Indonesia diperintah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk penguasa pun harus tunduk pada hukum yang berlaku, akan tetapi bekerjanya hukum di Indonesia saat ini menggambarkan bahwa implementasi konsep negara hukum hanya sebatas formalitas belaka. Garis kebijakan penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dibangun berlandaskan strategi Konsolidasi, Optimalisasi dan Pemulihan *Public Trust*. "Konsolidasi, optimalisasi dan pemulihan public trust itu sebagai tiga elemen dasar yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Optimalisasi dalam pelaksanaan tugas hanya akan dapat dicapai apabila seluruh elemen memiliki komitmen dan kesatuan langkah untuk berjalan mencapai tujuan (Konsolidasi). Di lain sisi, optimalisasi tanpa diiringi oleh *public trust* hanya akan menjadi sekedar data-data di atas kertas, yang tidak dapat dirasakan dampak dan manfaatnya secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Upaya pemulihan *public trust* dilakukan dengan cara membangun komunikasi dengan publik, bersinergi dengan dunia pendidikan serta pemberdayaan pusat kajian hukum.

Berdasarkan dari uraian kajian ini maka disimpulkan dari tujuh ancaman yakni dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, keselamatan umum, dan penegakan hukum. Di masing-masing dimensi tersebut ditemukan faktor penghambat dan pendorong dalam rangka mendukung pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor penghambat tersebut terdapat pada dimensi ekonomi dan sosial budaya yakni masih diketemukan faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan dan pengangguran secara keseluruhan belum mampu diselesaikan secara tuntas, sehingga perlu dibantu dalam meningkatkan taraf hidup

masyarakat secara merata. Kondisi tersebut terdapat di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bulukamba Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pinrang. Sementara untuk aspek penegakan hukum maka, dibutuhkan penambahan jumlah personel untuk mengawasi sirkulasi penerapan aturan untuk memonitoring dan melakukan evaluasi, sehingga menciptakan sistem pengawasan yang lebih maksimal dalam mencegah terjadinya praktik praktik penyelundupan barang serta narkoba dan *human trafficking* yang dianggap membahayakan dan memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia.

B. Rekomendasi

Untuk mendukung sinergitas pembangunan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara hendaknya mengelaborasi ancaman di masing-masing dimensi yang memungkinkan dapat menjadi faktor penghambat dan juga dapat berperan sebagai faktor pendukung dalam pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor penghambat tersebut terdapat pada aspek dimensi; (1) ekonomi, (2) teknologi informasi, (3) keselamatan umum, (4) sosial dan budaya, dan (5) penegakan hukum. Keempat dimensi tersebut dilakukan upaya penanganan secara serius oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi dengan Kementerian Lembaga terkait yang selanjutnya disinkronisasikan dengan program pembangunan di setiap kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus bagi dimensi

ekonomi pada kuadran I terdapat Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Wajo. Kuadran II ditempati oleh Kabupaten Selayar, Pangkajene Kepulauan, dan Bulukamba Kabupaten Jeneponto, Barru, Gowa, Luwu, Enrekang, Maros, Bone, dan Tana Toraja. Kuadran III Kabupaten Luwu Timur, Soppeng, Sinjai, Takalar, dan Pinrang terletak dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi yang terdapat di Indonesia. Terakhir kuadran IV adalah Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang, Luwu Utara, Bantaeng, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare. Untuk itu diperlukan upaya menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha baru dengan sistem kemitraan.

Dengan demikian, maka direkomendasikan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait agar melakukan pendataan untuk mengetahui alasan sehingga terjadinya faktor lambatnya pertumbuhan IPM, pengagguran, dan kemiskinan yang terdapat di Kabupaten/Kota. Upaya ini diperlukan untuk melakukan pendeteksian dini serta mencarikan solusi agar warga masyarakat di setiap kabupaten/kota mendapatkan stimulus dari pemerintah agar melakukan peningkatan kualitas keterampilan yang dimiliki oleh warga masyarakat. Selain dari pada itu, peran dari lembaga legislatif sewaktu melakukan kegiatan kunjungan kerja di masing-masing daerah pemilihannya untuk menghimpun dan meng-*update* data terbaru dimasing-masing wilayah dalam angka mengetahui sejauh mana peningkatan kualitas dari IPM yang ada di setiap kabupaten/kota.

Upaya untuk mewujudkan sinergitas pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara juga menjadi

salah satu tantangan dan tugas bagi pemerintah daerah yang melibatkan Lembaga Pemerintahan TNI/Polri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota. Koordinasi di antara Lembaga Pemerintahan ini dianggap penting, guna mencegah dan menanggulangi ancaman Nonmiliter di bidang Ekonomi yang disebabkan oleh pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya pertumbuhan IPM. Selanjutnya pada dimensi ancaman penegakan hukum dalam hal ini masih terdapatnya oknum yang terlibat dalam praktik mafia hukum dan kasus tanah.

Sinergitas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan itu bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Oleh karena, masih diketemukan beberapa hambatan-hambatan kecil yang dapat mengurangi kinerja dari koordinasi diantara Lembaga Pemerintahan, sehingga dapat berdampak terhadap belum optimalnya koordinasi yang dilakukan diantara Lembaga Pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam memaksimalkan sinergitas ini, diperlukan langkah-langkah kerja keras yang konkrit tuntas sampai ke akar permasalahannya.

Dengan demikian, guna mencapai efektivitas pelaksanaan tugas, maka disarankan adanya Perwakilan Kementerian Pertahanan RI secara definitif di masing-masing Provinsi. Perwakilan Kemhan RI tersebut bertujuan untuk melakukan upaya koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam program-program pertahanan dan keamanan nasional, sehingga langkah-langkah strategis yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Alasan utama dibalik saran ini adalah perlu optimalisasi di setiap peran yang lakoni oleh Lembaga Pemerintah yang selanjutnya mengkoordinir semua pemangku kepentingan dengan kewenangan yang besar yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan yang mengarah ke Ancaman Nonmiliter.

Perwakilan Kemhan RI secara definitif di masing-masing Provinsi ini maka harapan selanjutnya adalah dukungan anggaran yang memadai untuk menyukseskan upaya tersebut. Selama ini anggaran yang dikeluarkan Kemhan RI masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan program-program kerja masih sangat terbatas sesuai dengan kemampuan anggaran. Apabila upaya perwujudan sinergitas pembangunan di masing-masing Provinsi guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara menjadi program Nasional, maka diharapkan adanya anggaran khusus dari Pemerintah kepada semua pemangku kepentingan, sehingga memaksimalkan upaya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Demikian Kajian Sinergitas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Guna Menghadapi Ancaman Nonmiliter Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pertahanan Negara, sebagai bahan telaah bagi pengambil kebijakan dan pertimbangan bagi Pimpinan Kementerian Pertahanan RI dalam menentukan kebijakan strategis di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Alfandi, Widoyo. 2002. *Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Bakrie, Connie Rahakundini. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Creswell, Jhon. W. 1997. *Research Design Qualitative and Quantitative Approach.* London: Sage Publication.

Davis, Paul K, et all. 1996. *Adaptiveness in National Defense: The Basic of a New Framework, Issue Paper, Rand: National Defense Research Institute.*

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis. 2008. *Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008*.

Kurniawan, Deny. 2011. *Pancasila Sebagai Paradigma*. Yogyakarta: STIMIK AMIKOM Yogyakarta.

Kusnanto, Anggoro, Dr. 2003. *Kemanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum.* Denpasar Bali: Makalah Pembanding: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Luhulima, C.P.F. 2003.*Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara.* Jurnal Analisis CSIS. Tahun XXXII/2003. No. 1. Jakarta: CSIS.

Mirtusin, 2010. *Tugas Pertahanan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.* Tesis Magister: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin, Tesis Tidak Dipublikasikan.

Moleong, J. L. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Petronila. 2013. *Peran Militer Dalam Pembangunan Pertahanan dan Keamanan di Kalimantan Timur.* E.Journal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (1): 196-211. Ejournal.ip.fisip-unmul.org.

Plotnikov, Vladimir. 1996. *Headquarter of Russian Airborn Troops* dalam*Use of Force Resolving Military Conflict: Ways to Increase Efficiency.*

Rahman. 2013. *Optimalisasi Penyelenggaraan Pertahanan Wilayah Perbatasan Pendekatan Human Security Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.* Jurnal Ketahanan Nasional Nomor, XIX/April 2013/Hal 32-46. Universitas Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Susetyo, Heru. 2016. *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Esa Unggul.

Suryokusumo, Suryanto. 2016. *Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem*

Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta. Jakarta: Yayasan Obor Indoensia.

United Nations Development Program. 2007. *Human Development Report 2007*. www.undp.org. Diaksespada 11 Juni2017.

Widjoyanto, Andi. 2008. *Ringkasan Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.* Diakses 15 Juli 2017. http//www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/Doktrin. Kartika Eka Paksi.

Wulan, Alexandra R. 2008. *Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia.* Indonesia: Pacivis Universitas Indonesia dan Friedrich Ebert Stiftung Indonesia Office.

Sumber Lain:

http://news.liputan6.com. Jejak ISIS Dalam Aksi Teror di Indonesia. Diakses pada 11 Juni 2017.

http://rakyatsulsel.com. Anggota DPR RI Asal Sulsel Jadi Tersangka. Diakses 11 Juni 2017. https://m.tempo.co. BPS Hampir 11 Persen Penduduk Indonesia Tergolong Miskin. Diakses 11 Juni 2017.

https://m.tempo.co. Sulsel Rawan Jadi Tempat Persembunyian Teroris. Diakses 27 Juni 2017.

http://citizen6.liputan6.com. 8WarisanBudaya Indonesia yang Pernah Diklaim Malaysia. Diakses 11 Juni 2017.

http://www.kabar.news. Ini Alasan Peredaran Narkoba di Sulsel Marak Terjadi. Diakses 27 Juni 2017.

http://sulsel.rakyatku.com. Dinas KISP Sulsel Waspada Kejahatan Dunia Maya Wanna Cry. Diakses 11 Juni 2017.

http://regional.kompas.com. Sulsel Urutan ke-13 Dalam Peredaran Narkoba. Diakses 27 Juni 2017.

https://sulselprov.go.id. Profil Provinsi. Diakses 11 Juni 2017.

http://www.kompasiana.com. Begal Kembali Beraksi Makassar Semakin Tidak Aman. Diakses 27 Juni 2017.

https://id.wikipedia.org. Pertahanan Negara. Diakses pada 11 Juni 2017.

https://www.kemhan.go.id. Tugas dan Fungsi Kementerian Pertahanan. Diakses pada 11 Juni 2017.

Tentang Penulis



Penulis lahir di Kabupaten Maros, pada tanggal 15 April 1983, sebagai anak ke lima dari tujuh bersaudara, pasangan H. Abd. Rochim, B.R dan (Almh) Hj. Sitti Saddiyah Yohannes Erong. Pendidikan SD Negeri 1 tahun 1989 lulus tahun 1995 di Kabupaten Maros, SMP Negeri 1 tahun 1995 lulus tahun 1998 di Kabupaten Maros, dan SMU Negeri 2 tahun 1998 lulus tahun 2001 di Kabupaten Maros. Selanjutnya pendidikan Sarjana ditempuh tahun 2004 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi Universitas Sawerigading di Makassar, kemudian menamatkannya tahun 2007. Pada tahun 2008, penulis melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin di Makassar, kemudian menamatkannya tahun 2010. Pada tahun 2012, penulis berkesempatan untuk melanjutkan ke Program Pascasarjana Doktoral Sosiologi Universitas Negeri Makassar.

Penulis pernah bekerja sebagai konsultan perencanaan wilayah pada program kerjasama dengan Non-Government Organization untuk sejumlah proyek perencanaan wilayah di Indonesia Timur pada tahun 2010-2012. Sejak tahun 2011-sekarang, penulis sebagai staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sawerigading Makassar. Selanjutnya, penulis juga aktif berorganisasi diantaranya; anggota Ikatan Ahli

Perencanaan (IAP-Sulsel) tahun 2011-2019, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Sawerigading (IKA-Unsa) tahun 2016-2020, anggota Himpunan Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS-Sulsel) tahun 2015-2019, anggota Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI-Sulsel) tahun 2016-2020, anggota Forum Dosen Indonesia (FDI-Sulsel) tahun 2016-2020, dan anggota Assosiasi Dosen Pendidikan dan Kewarganegaraan (ADPKn-Sulawesi) tahun 2016-2020, serta termasuk dalam tim pendiri Yayasan Institute Toddopuli Makassar tahun 2016. Dalam jabatan strukturalnya juga diberi amanat sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Sawerigading Makassar, tahun 2016-2020. Selanjutnya mendapat amanah sebagai Dekan Fisipol Universitas Sawerigading Makassar Masa Bakti Oktober 2020 – Oktober 2024.

Turnitin Ebook Ancaman Non Militer

ORIGINALITY REPORT

12%	%	12%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Mahson, Muhamad. "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Sustainable Development di Kota Pekalongan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
2	Irwansah. "Pelibatan tni Dalam Penanggulangan Bencana Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
3	Tugino Utomo, Harini Harini. "IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA YANG BERWAWASAN KEMARITIMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19", Majalah Ilmiah Gema Maritim, 2021 Publication	1%
4	Solichan. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polda Jateng", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
5	Ali Maksum, Surwandono Surwandono. "Analisis Tata Kelola Keamanan Indonesia	<1%

Masa Kini: Studi Kasus UU NO. 34/2004, UU NO. 2/2002, UU NO. 7/2012", Jurnal Keamanan Nasional, 2021
Publication

---

6 Stendo Berthyno Sitania, Hendrik Salmon, Andress Deny Bakarbessy. "Kedudukan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2023 <1%
Publication

---

7 Nadya Azzahra, Syamsir Syamsir, Muhammad Amin. "KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022 <1%
Publication

---

8 Ahyar Ari Gayo. "PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA YANG TERKAIT DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to The Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional CourtNo.35/ PUU- X/2012)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 <1%
Publication

---

9 Hayati Nufus. "PERANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM MEMBINA TUMBUH KEMBANG ANAK DI KOTA AMBON", al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2016 <1%
Publication

---

10 Bayu Rhamadani Wicaksono, Muhammad Aliem. "INVESTASI PENDIDIKAN MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN", <1%

Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan, 2021
Publication

---

11 Hede Uly, G. Harsono, M. Supriyatno, R. A. G. Gultom. "Strategi Pertahanan Negara dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Indonesia-RDTL)", Journal on Education, 2023 <1%
Publication

---

12 Jagad Aditya Dewantara, Sulistyarini Sulistyarini, Afandi Afandi. "SISTEM GOTONG ROYONG SEBAGAI KEADABAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC VIRTUE) DALAM MEWUJUDKAN KONSEP BELA NEGARA (GROUNDED THEORY)", Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 2022 <1%
Publication

---

13 Chaira Saidah Yusrie, Siti Aminah, Iim Wasliman, R Supyan Sauri. "Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan:", Jurnal Dirosah Islamiyah, 2021 <1%
Publication

---

14 Miki Indika, Abdika Jaya, Novi Septianah. "Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pendapatan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau", Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2020 <1%
Publication

---

15 Muh. Risnain. "POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS", FIAT JUSTISIA, 2015 <1%
Publication

---

16 Riwanto Tirtosudarmo. "The Politics of Migration in Indonesia and Beyond", Springer <1%

Science and Business Media LLC, 2018
Publication

17	Lamidi Lamidi. "IMPLEMENTASI PENGUATAN BELA NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU", Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 2023 Publication	<1 %
18	Mely Caballero-Anthony. "SARS in Asia: Crisis, Vulnerabilities, and Regional Responses", Asian Survey, 2005 Publication	<1 %
19	Bayu Vita Indah Yanti. "PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN TERKAIT UPAYA PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN", Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2014 Publication	<1 %
20	Suhadi. "Rekontruksi Kompilasi Hukum Islam Indonesia Perspektif Madzhab di Nusantara Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
21	Dindin Supratman. "PREVALENSI USIA PEMUDA DAN KETAHANAN NASIONAL (NARKOTIKA DAN ANCAMAN LOST GENERATION)", Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan, 2018 Publication	<1 %
22	Muhammad Ananta Firdaus, Risni Ristiawati, Salma Saphira. "FORMULASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN", Jurnal Ius Constituendum, 2021 Publication	<1 %
23	Kristiyanto, Andi. "Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa Sebagai	<1 %

Perwujudan Otonomi Desa (Studi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Pekalongan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

---

24 Listyawati, Peni Rinda. "Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Berbasis Asas Ta'Awun", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

---

25 Iwan Henri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kabupaten Subang", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2020 <1%
Publication

---

26 Mohamad Fitriady Helfian Hutami, Syahruni Ahmad, Ridwan Ridwan, Mamduh Fikri et al. "Peluang dan strategi pengurangan emisi di Kawasan Delta Mahakam, Kalimantan Timur", e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 2020 <1%
Publication

---

27 Akip Suhendar, Siswanto Siswanto, Riani Dwi Nurhamzah. "(EBSIS) ELECTRONIC BLOOD STOCK INFORMATION SYSTEM SEBAGAI PUSAT INFORMASI STOCK DARAH PADA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) KABUPATEN SERANG", ProTekInfo(Pengembangan Riset dan Observasi Teknik Informatika), 2018 <1%
Publication

---

28 Hendarmin Hendarmin. "Menelusuri Kembali Peran Investasi Modal Manusia dan Modal Fisik Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Produktivitas", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2019 <1%
Publication

29	Ricardo Marlon Mauwa, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Jemmy Jeffry Pietersz. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022 Publication	<1 %
30	Arif Mustofa. "Covid-19 Dalam Kerangka Irregular Warfare ditinjau dari Perspektif Strategi Pertahanan Negara", Jurnal Keamanan Nasional, 2021 Publication	<1 %
31	Mapparenta Mapparenta, Aryati Arfah. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dari Segi Pengeluaran Terhadap Tingkat Pengangguran", JURNAL ECONOMIC RESOURCE, 2020 Publication	<1 %
32	Muhammad Iqbal, Abrar Saleng, Sri Susyanti Nur. "Analisis Aspek Hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Yasmin Bumi Asri pada Proyek Reklamasi Kawasan Centre Point of Indonesia", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2020 Publication	<1 %
33	Al A'raf Al A'raf. "Dinamika Keamanan Nasional", Jurnal Keamanan Nasional, 2015 Publication	<1 %
34	Amitav Acharya. "Human Security", International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, 2016 Publication	<1 %
35	Burhanuddin, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan",	<1 %

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

36 Kurnia Kurnia. "Reformulasi dana alokasi umum, menghitung kebutuhan fiskal daerah berbasis unit cost", Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2019 <1%
Publication

37 Wasehudin Wasehudin. "Pancasila as The Code of Conduct Paradigm (Comparative Study of National Education And Islamic Studies)", Halaqa: Islamic Education Journal, 2020 <1%
Publication

38 Rikaltra, Fredy. "Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

39 Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati, Doddy Kridasaksana. "PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK PANDANARAN SEMARANG MENGENAI PENTINGNYA MENANAMKAN NILAI KEBHINNEKAAN DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2019 <1%
Publication

40 Intan Leliana, Herry Herry, Panji Suratriadi, Edward Enrieco. "Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com", Cakrawala - Jurnal Humaniora, 2021 <1%
Publication

41	Syafrial Syafrial. "Efektifitas Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi", Tanah Pilih, 2021 Publication	<1 %
42	Beni Sukadis. "Reformasi di Kementerian Pertahanan RI", Jurnal Keamanan Nasional, 2016 Publication	<1 %
43	Efendi, Bahtiyar. "Rekonstruksi Regulasi Pencegahan Terorisme di Era Digitalisasi yang Berorientasi pada Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
44	Indratno, Krisnat. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
45	Wijaya, Septiarif Hakim. "Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Untuk Mengganti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
46	Ahmad Jazuli. "Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %

47	Mochamad Riyanto, Rini Retno Winarni. "KONSTRUKSI HUKUM KESEHATAN DAN LATAR BELAKANG HISTORISNYA", Jurnal JURISTIC, 2022 Publication	<1 %
48	Reiza D. Dienaputra, Susi Machdalena, Nyai Kartika. "INVENTARISASI POTENSI OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI JAWA BARAT", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2023 Publication	<1 %
49	Nisa Permata Basti. "POLITIK HUKUM PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SUMBER PENERIMAAN NEGARA", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020 Publication	<1 %
50	Rofik, Muhammad Nur. "Implementasi Program Moderasi Beragama Di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Sekolah", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
51	Warsono Warsono. "Koperasi dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2016 Publication	<1 %
52	Wise Dovanita Sari. "PENERAPAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025 HUKUM PIDANA INDONESIA", Jurnal JURISTIC, 2021 Publication	<1 %
53	Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana	<1 %

Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication

54 Kencana, Dyah Ayu Manggar. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Kasus Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

55 Mia Alfin Dahana, . Ermwati. "Analysis of The Budget Planning Process and Budget Execution Process", European Journal of Business and Management Research, 2020 <1%
Publication

56 Nurdin, Moch. "Rekonstruksi Sistem Kewenangan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan Operasional Kapal yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

57 Nurul Fitrah Febriani, Hidayatullah Hidayatullah, Lalu Sopan Tirta Kusuma. "Optimalisasi Program Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kreatifitas Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Di Kabupaten Lombok Tengah", Journal of Government and Politics (JGOP), 2021 <1%
Publication

58 Elsa Merdian, Ngudining Rahayu, Bambang Djunaidi. "ANALISIS TINDAK TUTUR DALAM INTERAKSI TENTARA KODIM 0409 REJANG LEBONG", Jurnal Ilmiah KORPUS, 2019 <1%
Publication

59	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
60	L Handayani, R Amelia, F H A Putera. "Rice Production Estimation In Central Sulawesi Through The Utilization Of Rainfall By Using Generalized Additive Model", JURNAL ILMIAH MATEMATIKA DAN TERAPAN, 2020 Publication	<1 %
61	Rizal Sukma. "The ASEAN political and security community (APSC): opportunities and constraints for the R2P in Southeast Asia", The Pacific Review, 2012 Publication	<1 %
62	Zuhdi, Ahmad. "Abdul Karim Jamak dan Pemikirannya Tentang Konsep Ketuhanan", University of Malaya (Malaysia), 2023 Publication	<1 %
63	Eko Setijo Pudjiantoro, Faurna Luciani Pakpahan, Hady Efendy. "The Transformation of Leadership Style in Shaping the Character of World Class Navy Officer", International Journal of Human Resource Studies, 2017 Publication	<1 %
64	Ibnu Kurniawan, . Ernawati, Yanuar Fitri. "ANALISIS RISIKO USAHATANI TANAMAN PANGAN DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI", Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis, 2015 Publication	<1 %
65	Marthsian Yeksi Anakotta, Hari Sutra Disemadi. "Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam	<1 %

Kerangka Legal System Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme", Jurnal Keamanan Nasional, 2020
Publication

---

66 Muhammad Aufa. "Penganggaran Daerah: Dinamika Politik Menuju Konsensus", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2018 <1%
Publication

---

67 Noviar Noviar. "ANALISIS KETIMPANGAN DAN KLASIFIKASI PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016-2020", Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 2021 <1%
Publication

---

68 Udin Rosidin, Hartiah Haroen, Nina Sumarni, Dadang Purnama, Witdiawati Witdiawati, Rohmahalia M Noor. "Hubungan Pengetahuan Fungsi Keluarga dengan Pelaksanaan PHBS Masa Covid-19 pada Tokoh Masyarakat", Malahayati Nursing Journal, 2023 <1%
Publication

---

69 Amal Amal, Baharuddin Semmaila, Junaiddin Zakaria. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2021 <1%
Publication

---

70 Andi Muhammad Yasser Hakim, Sumbangan Baja, Dorothea Agnes Rampisela, Samsu Arif, Masayuki Matsuoka, Iwan Ridwansyah. "Assessment of future environmental carrying capacity in the Mamminasata area, Indonesia, derived from regional census and land cover", International Journal of Environmental Studies, 2023 <1%

Publication

71 Hilwa Salma Syahdan, Adi Rahmannur Ibnu. "Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah Di Desa Cianaga Kabandungan Jawa Barat", ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021 <1%
Publication

72 Laswaniyah, Marfu'ah. "Implementasi Nilai Karakter Dalam Kegiatan Pembinaan Mental Prajurit Oleh Korem 071/Wijayakusuma", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 <1%
Publication

73 Lies Kurnia Irwanti. "KAJIAN ATAS IMPLEMENTASI PMK NOMOR 195/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR STRUKTUR BIAYA", Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 2019 <1%
Publication

74 Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1%
Publication

75 Tuty Mutiah, Dhefine Armelsa, Faqihar Risyan, Agung Raharjo. "DISTOPIA KONDISI LIBERALISME DALAM FILM TIGA (Studi Semiotika Roland Barthes Tentang Distopia Liberalisme di Jakarta dalam Film Tiga)", Cakrawala - Jurnal Humaniora, 2019 <1%
Publication

76 Choiri Choiri, Didik Hariyanto. "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI <1%

SIDOARJO NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016
Publication

77 Erni Zuliana. "Film “sang kyai”", Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, 2019 <1%
Publication

78 IRWAN IRWAN, ASTRI YUNI HASHARI, HISYAM IHSAN, AHMAD ZAKI. "PENGGUNAAN SELF ORGANIZING MAP DALAM PENGELOMPOKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT", Jambura Journal of Probability and Statistics, 2020 <1%
Publication

79 Muhar Junef. "Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 <1%
Publication

80 Ningrum Ningrum. "PENGARUH PENERAPAN MODEL ACTIVE LEARNING TIPE TEAM QUIZ TERHADAP HASIL BELAJAR KEWIRAUSAHAAN SISWA KELAS X SEMESTER GENAP SMK KARTIKATAMA METRO TAHUN PELAJARAN 2014/2015", PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi), 2015 <1%
Publication

81 Shofani, Akhmad. "Manajemen Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MTs Ma’arif NU 5 Dawuhan Sirampog Brebes", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024 <1%
Publication

82 Wicipto Setiadi, Ali Imran Nasution. "Sanksi Administratif terhadap Kepala Daerah yang <1%

tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Publication

83	Hellen Last Fitriani, Nurhadi Nurhadi. "Hukum Tata Negara tentang Pemerintah dan Otonomi Daerah", YASIN, 2022 Publication	<1 %
84	Lalu Adit Cahaya Maolana, Muchammad Zaenuri. "IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM MENEKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI NTB BERDASARKAN PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2019", JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 2022 Publication	<1 %
85	Ratnaningsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
86	Syafruddin, Andi Adnan. "Rekonstruksi Regulasi Peneyelesaian Sengketa Pertanahan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
87	Abdul Syatar, Juliana Juliana, Zehratul Eitriya, Rifaldi Rifaldi, Winanda Winanda, Alfajri Anugrah, Angelina Atika Putri. "FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH: ANALISIS PERATURAN DAERAH SYARIAH DI BULUKUMBA", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021 Publication	<1 %

88 Adi Yanuar Fadillah, Nurna Aziza, Lisa Martiah. "PENGARUH SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH", JURNAL FAIRNESS, 2021 <1%
Publication

89 Amelia, Vera. "Peran dan Kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

90 Azwar Iskandar, Rahmaluddin Saragih. "ANALISIS KONDISI KESENJANGAN EKONOMI DAERAH : STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN", INFO ARTHA, 2018 <1%
Publication

91 Bambang Karsono. "Gerakan Islam Radikal di Sulawesi Selatan: Pola Rekrutmen dan Pola Gerakan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) dan Laskar Jundullah", Jurnal Keamanan Nasional, 2018 <1%
Publication

92 Beny Sitakar, Ayu Andini, Nadya Dewi Anggita, Suhairi Suhairi. "Langkah-Langkah Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Dalam Bidang Ekonomi", Jurnal Minfo Polgan, 2024 <1%
Publication

93 Danang Risdiarto. "Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 <1%
Publication

94	Debby Ch. Rotinsulu, Avriano R. Tenda, Luciana M. Leonufina. "ANALISIS DAMPAK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI SULAWESI UTARA", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019 Publication	<1 %
95	Desryanti Londong Padang, Altien J. Rindengan, John S. Kekenusa. "Analisis Biplot pada Pemetaan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara", d'CARTESIAN, 2019 Publication	<1 %
96	Encik Muhammad Fauzan. "KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM MELALUI REGULASI DAERAH", Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2020 Publication	<1 %
97	Fariyana, Meychyka Bella. "Peran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam pengawasan dan penindakan orang asing di wilayah satuan kerja Jawa Tengah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
98	Hasnidar Yuslin, Ahmad Irfan. "KESETARAAN GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN", AN-NISA, 2022 Publication	<1 %
99	Ishak U. Saputra, Alicia Sinsuw, Xaverius B.N. Najoan. "Pengembangan Aplikasi Location Based Service Pariwisata berbasis Android	<1 %

Studi Kasus Kabupaten Toraja Utara", Jurnal Teknik Informatika, 2017
Publication

---

100 Junaidi, Mohamad Hakim. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

---

101 Lina Marlina, Udi Hamzah. "PROBLEM POSING LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA", Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, 2019 <1%
Publication

---

102 M. Bahtiar Fajri. "STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA PERANG HIBRIDA KAWASAN LAUT CHINA SELATAN", Jurnal Penelitian Politik, 2020 <1%
Publication

---

103 Muhammad Abduh. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2020 <1%
Publication

---

104 Nurkholis, Kurniawan. "Strategi Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Di SMK Tamansiswa Purwokerto", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 <1%
Publication

---

105 Ompusunggu, H. Novri. "Rekonstruksi Regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah Yang <1%

Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

106 Parji Parji. "PENGEMBANGAN NILAI-NILAI INTEGRITAS DAN IDENTITAS NASIONAL DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2011 <1%
Publication

107 Riyanto, Sujid. "Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Becak Menjadi Becak Motor (Bentor) di Polrestabes Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

108 Rozikhan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

109 Sambodo, Cemban Galuh. "Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Polres Grobogan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 <1%
Publication

110 Taufik H. Simatupang. "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1%
Publication

111 Yudi Rusfiana, Handoko Nurseta. "Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Melalui Strategi Kampanye Militer dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2021 <1%
Publication

112 Azwar Azwar. "ANALISIS DINAMIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP EFISIENSI BELANJA KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN: STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN", INFO ARTHA, 2022 <1%
Publication

113 Dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan sejarah realitas dan tantangan menuju pemerintahan otonomi yang mandiri, 2005. <1%
Publication

114 Greg Suripatty, Hendrik Salmon, Julista Mustamu. "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi di Daerah", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2023 <1%
Publication

115 Ni'Mah, Fadhilatun. "Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Pt. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

116 Okky Chahyo Nugroho. "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 <1%
Publication

117 Risa Novianti, Khairudin. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Fiscal Stress Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Lampung", Jurnal EMT KITA, 2023 <1%
Publication

118 Roby Rakhmadi, Agus Hadiawan, Prasetya Nugeraha. "Penyuluhan Tentang Kewaspadaan Nasional Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional Bagi Generasi Muda di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, 2022 <1%
Publication

119 Rudolf Toar Shaloom Manoppo, Agustinus ., Pati, Alfon ., Kimbal. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL DI WILAYAH KOMANDO DISTRIK MILITER 1309 / MANADO", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2021 <1%
Publication

120 Elro Garry Sorongan, Denny Karwur, Johny A. F. Kalangi. "STRATEGI PENATAAN RUANG BERBASIS MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DANAU TONDANO KABUPATEN MINAHASA", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2022 <1%
Publication

121 Erna Dewi, Volanda Azis Saleh. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan", Ius Poenale, 2020 <1%
Publication

122 Kadriwansyah Kadriwansyah, Baharuddin Semmaila, Junaiddin Zakaria. "Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi <1%

Selatan Tahun 2014-2018", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2021
Publication

123 MAKSI MAKSI MAKSI. "Volume 3 Nomor 1 Juni 2012", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2012 <1%
Publication

124 Sebastian, Willy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

125 Simamora, Jonariko. "Analisis Yuridis Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

126 Sofyan Malik. "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA", Jurnal Ius Constituendum, 2020 <1%
Publication

127 Sucipto, Hendro. "Rekonstruksi Kebijakan Pelayanan Kegawat Daruratan Medis Konsumen Kesehatan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 <1%
Publication

128 Utama, Ragil Jaka. "Analisis Hukum Kewenangan Absolut Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1%
Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		